

**ANALISIS PENGARUH KESENJANGAN SOSIAL, INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM), DAN PENGANGGURAN
TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI LAMPUNG (2012-2023)**

(Skripsi)

Oleh :

Fauzi Nur Kholis

2011021027



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

**ANALISIS PENGARUH KESENJANGAN SOSIAL, INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM), DAN PENGANGGURAN
TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI LAMPUNG (2012-2023)**

Oleh
FAUZI NUR KHOLIS

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI
Pada
Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**ANALISIS PENGARUH KESENJANGAN SOSIAL, INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM), DAN PENGANGGURAN
TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI LAMPUNG (2012-2023)**

Oleh

FAUZI NUR KHOLIS

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesenjangan sosial, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung selama periode 2012–2023. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Berdasarkan uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier (LM), REM ditetapkan sebagai model terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio gini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan IPM berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, yang diduga karena dominasi sektor informal dan efektivitas program perlindungan sosial. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kemiskinan bersifat multidimensi dan tidak hanya dipengaruhi oleh variabel ekonomi semata. Penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, dengan fokus pada pengurangan ketimpangan dan peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Kata Kunci: IPM, Kemiskinan, Kesenjangan Sosial, Lampung, TPT

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF SOCIAL INEQUALITY, HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI), AND UNEMPLOYMENT ON POVERTY IN LAMPUNG PROVINCE (2012-2023)

By

FAUZI NUR KHOLIS

This study aims to analyze the effect of social inequality, Human Development Index (HDI), and open unemployment rate (TPT) on poverty levels in Lampung Province during the period 2012–2023. The method used is panel data regression with the Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), and Random Effect Model (REM) approaches. Based on the Chow, Hausman, and Lagrange Multiplier (LM) tests, REM was determined as the best model. The results of the study indicate that the Gini ratio has a positive and significant effect on poverty, while the HDI has a negative and significant effect. Meanwhile, TPT does not have a significant effect on poverty, which is thought to be due to the dominance of the informal sector and the effectiveness of social protection programs. These findings reinforce the view that poverty is multidimensional and is not only influenced by economic variables alone. This study suggests the need for more inclusive development policies, with a focus on reducing inequality and improving the quality of life through education, health, and social protection.

Keywords: Human Development Index, Lampung, Poverty, Social Disparity, TPT

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Kesenjangan Sosial, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung (2012 – 2023)

Nama Mahasiswa : Fauzi Nur Kholis

NPM : 2011021027

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Toto Gunarto S.E, M.Si
NIP 195603251983031002

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Arvina Ratih Y.T, S.E., M.M.
NIP 198007052006042002

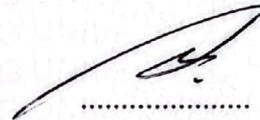
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji:

Ketua : **Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E, M.Si.**



Penguji 1 : **Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E.**



Penguji 2 : **Emi Maimunah, S.E., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **06 Mei 2025**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzi Nur Kholis

NPM : 2011021027

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

"Analisis Pengaruh Kesenjangan Sosial, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung (2012–2023)" adalah benar-benar hasil karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya unsur plagiarisme dalam karya ini, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum dan akademik yang berlaku di lingkungan Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Bandar Lampung, 26 Mei 2025

Y... M... T... pernyataan,



Fauzi Nur Kholis

RIWAYAT HIDUP

Fauzi Nur Kholis lahir di Dipasena Utama, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, pada tanggal 20 Desember 2001. Sebagai anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan bernama Bapak Supriyono dan Ibu Nurmiati, penulis dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang menanamkan nilai kerja keras, kejujuran, dan kesederhanaan. Pendidikan dasar ditempuh di SD Negeri 2 Harapan Jaya pada tahun 2008 hingga 2014, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 21 Bandar Lampung pada tahun 2014 hingga 2017. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Utama 3 Bandar Lampung, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama masa perkuliahan, penulis aktif berkontribusi dalam kegiatan kemahasiswaan, antara lain sebagai anggota ROIS FEB Unila, serta Anggota MAHEPEL (Mahasiswa Ekonomi Pencinta Lingkungan). Pada tahun 2023, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Pekon Penggawa Lima Ulu, Kecamatan karya penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, dengan fokus pengembangan potensi desa. Dalam kesempatan yang sama, penulis juga mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) tahun 2023 tingkat nasional dan berhasil meraih insentif pada bidang Gagasan Futuristik Tertulis (PKM-GFT). Sebagai wujud pengaplikasian ilmu, pada pertengahan tahun penulis terpilih dalam Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) *batch* 5 Kampus Merdeka dan menjalani masa *internship* selama Lima bulan sebagai *Business Development Intern* di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI).

MOTO

“Tuhan tidak membawa kamu sejauh ini, Hanya untuk menyerah“

(Penulis)

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, Dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 216)

“Selesaikan apa yang sudah dimulai, Berhasil ataupun tidak, setidaknya kamu sudah bertarung dengan hebat“

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Alhammdulillahi robbil allammin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah nya kepada kita semua, utama nya kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Untuk diri ku, **FAUZI NUR KHOLIS**

Yang sudah bertahan dari apapun yang terjadi, dengan segala *struggle* yang dihadapi dari awal perkuliahan sampai nanti setelah perkuliahan tuntas.

Untuk kedua orang tua ku, Bapak **Supriyono** dan Ibu **Nurmiati**,

Yang sudah mendidik, memberikan kasih sayang, dengan segala bentuk dan Cara nya masing-masing, sampai akhirnya diriku mengerti arti ikhlas, sabar dan kerja keras, membentuk diriku menjadi pribadi yang berusaha lebih baik, lebih kuat, dan terus belajar kedepannya. Dan diriku bisa membuktikan bahwa diriku bisa menjadi Sarjana Pertama di Keluarga, dengan segala kesederhanaan yang selalu diajarkan kepadaku. Sulit untuk ku ucapkan secara langsung, namun percayalah bahwa rasa terima kasih dan doa ku kepada kalian berdua tidak akan pernah putus.

Untuk saudara-saudara ku, yang telah membersamai, memberikan masukan dan sudut pandang lain, memberikan dukungan meskipun secara tidak langsung, dan untuk adik ku yang paling kecil, besar harapanku bisa melihatmu tumbuh menjadi lebih baik dariku. Terima kasih.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya Program Studi Ekonomi Pembangunan, atas ilmu, bimbingan, dan inspirasi yang tiada henti. Penulis bangga menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Lampung.

SANWACANA

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi "Analisis Pengaruh Kesenjangan Sosial, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2012–2023" yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E. , Ibu Emi Maimunah. S.E., M.Si , dan Ibu Resha Moniyana Putri, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembahas dan Penguji, yang telah memberikan panduan, dukungan, serta saran-saran penting sepanjang proses penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Arivina Ratih, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Zulfa Emalia, S.E., M.Sc. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Seluruh Dosen di Jurusan Ekonomi Pembangunan maupun dosen dari jurusan lainnya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
6. Kedua orang tuaku tercinta, untuk Bapak Supriyono dan Ibu Nurmiati yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, motivasi, serta dukungan setiap saat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.

7. Teman-teman sepembimbingan skripsi, Ferdi, Dea, Deswira, dan Azizah yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses pengerjaan skripsi.

Bandar Lampung, 26 Mei 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fauzi Nur Kholis', written in a cursive style with a large initial 'F'.

Fauzi Nur Kholis

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Dan Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	12
II.KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Kajian Pustaka	14
A. Tinjauan Teoritis	14
2.1.1 Konsep kemiskinan	14
2.1.2 Konsep kesenjangan sosial	17
2.1.3 Konsep indeks pembangunan manusia.....	20
2.1.4 Konsep Pengangguran.....	24
2.2 Kerangka Pemikiran	32
2.3 Hipotesis	34
2.4 Relevansi Variabel Bebas terhadap Kemiskinan.....	34
2.4.1. Rasio gini dan Kemiskinan.....	34
2.4.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan	35
2.4.3. Pengangguran dan Kemiskinan	35
III. METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.2 Definisi Operasional Variabel	37
3.3 Metode Analisis Data	38
3.3.1 Uji Statistik Deskriptif.....	39
3.3.2 Metode Estimasi Model Regresi Data Panel.....	39
3.4 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel	42
3.5 Uji Asumsi Klasik	44
3.5.1 Uji Normalitas	44
3.5.2 Uji Multikolinearitas.....	45
3.5.3 Uji Heteroskedastisitas	45
3.5.4 Uji Autokorelasi.....	46
3.6 Uji Signifikansi	46
3.6.1 Uji f	47
3.6.2 Uji t	47

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Analisis deskriptif	49
4.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel	51
4.2.1 Uji Chow	51
4.2.2 Uji Hausman	51
4.2.3 Uji Lagrange Multiplier	52
4.3 Random Effect Model	53
4.4 Uji Asumsi Klasik	54
4.4.1 Uji Normalitas	54
4.4.2 Uji Multikolinearitas	55
4.4.3 Uji heteroskedastisitas	56
4.4.4 Uji Autokorelasi	56
4.5 Uji signifikansi	58
4.5.1 Uji f	58
4.5.2 Uji t	59
4.5.3 Ketidaksinifikanan TPT Terhadap Kemiskinan	63
V. KESIMPULAN DAN SARAN	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	74
5.3 Rekomendasi Penelitian Lanjutan	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Presentase Penduduk Miskin di Sumatera tahun 2023	7
1.2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung tahun 2023 ..	8
1.3 Rasio gini Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung tahun 2023	9
1.4 IPM Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung tahun 2023	10
1.5 TPT Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung 2023	11
2.1 Penelitian terdahulu	28
3.1 Operasionalisasi Variabel.....	38
4.1 Hasil Uji statistik Deskriptif.	49
4.2 Hasil Uji chow..	51
4.3 Hasil Uji hausman	51
4.4 Hasil Uji LM..	52
4.5 Hasil Uji random effect model.....	53
4.6 Hasil Uji multikolinearitas	55
4.7 Hasil Uji F	58
4.8 Hasil Uji T.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Presentase Penduduk Miskin Indonesia 2012-2023	2
1.2 Presentase Penduduk Miskin Indonesia 2000-2015	3
1.3 Presentase TPT untuk Perempuan di Indonesia tahun 2018-2023	5
2.1 Kurva Lorenz	20
4.1 Hasil Uji normalitas	54
4.2 Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian tahun 2023 di Indonesia	65
4.3 Persentase tenaga kerja formal tahun 2015-2023 di Provinsi Lampung	67
4.4 Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian tahun 2015-2023 di Provinsi Lampung	69

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dan Masalah

Kemiskinan, sebagai tantangan multidimensi yang telah menghambat kesejahteraan manusia selama berabad-abad, masih mewarnai kehidupan di berbagai penjuru dunia, dari hiruk-pikuk Kota hingga pelosok desa, di mana kisah perjuangan masyarakat kurang beruntung terus tersirat (Kuncoro, 2012). Realitas ini bukan sekadar keterbatasan materi, tetapi juga minimnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, yang menyebabkan kelompok rentan semakin terpinggirkan dibandingkan mereka yang dengan mudah menikmati fasilitas terbaik. Urgensi mengatasi kemiskinan telah menjadi inti agenda pembangunan global, sebagaimana tercermin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diadopsi PBB pada 2015, dengan tujuan pertama, "Tanpa Kemiskinan" (*No Poverty*), yang menegaskan komitmen dunia untuk menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya di seluruh wilayah pada tahun 2030 (United Nations, 2015).

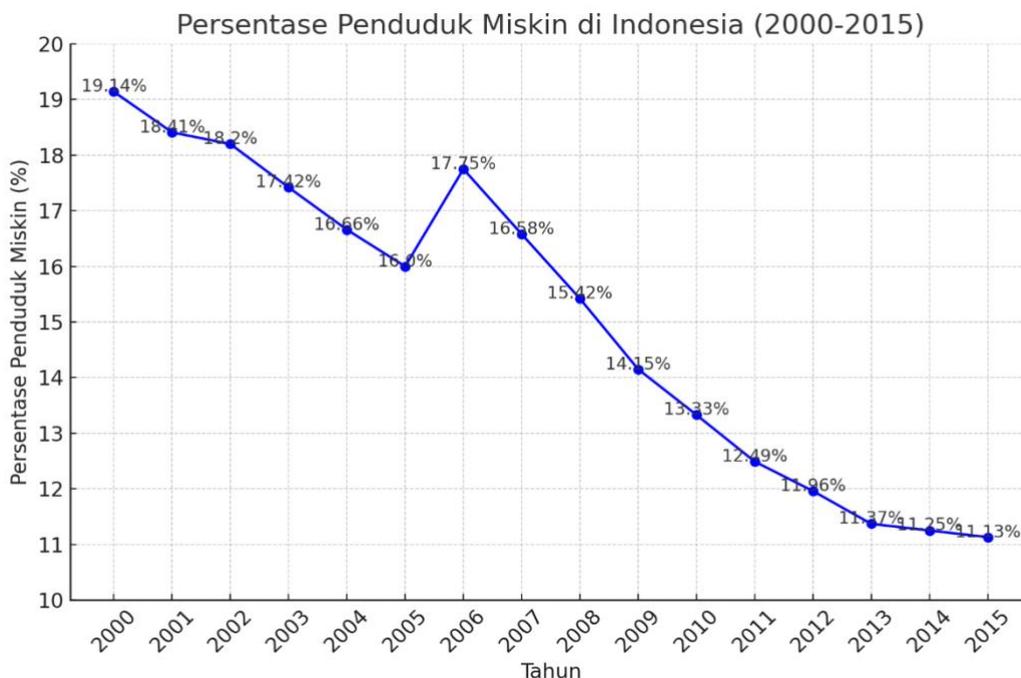
Kemiskinan tetap menjadi tantangan utama di Indonesia, Data BPS (2023) mencatat bahwa sebanyak 25,90 juta orang atau sekitar 9,36% dari total penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan. Penurunan dari 11,37% pada tahun 2012 menjadi 9,22% pada tahun 2019 memang mencerminkan adanya kemajuan, namun tidak cukup untuk menghapus problematika kemiskinan secara menyeluruh. Seperti diungkapkan oleh Suryahadi et al. (2020), kemiskinan tetap menjadi masalah mendasar yang berakar pada ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak. Pandemi COVID-19 menjadi bukti nyata rapuhnya pencapaian tersebut, karena menyebabkan lonjakan kembali angka kemiskinan pada tahun 2020, memutar balik tren positif yang telah dicapai sebelumnya (Olivia et al., 2020). Angka kemiskinan hingga 2023 berfluktuasi karena kompleksitas struktural kemiskinan, bukan hanya dampak krisis jangka pendek. Oleh karena itu, sebagaimana ditegaskan oleh Suryahadi dan Al Izzati (2021), diperlukan kebijakan strategis dan terarah yang tidak hanya fokus pada penanggulangan kemiskinan jangka pendek, tetapi juga pada pengurangan ketimpangan dan peningkatan kapabilitas masyarakat secara berkelanjutan.



Sumber: BPS 2023

Gambar 1.1 Presentase Penduduk Miskin Indonesia 2012-2023

Gambar 1.1 menunjukkan tren persentase penduduk miskin di Indonesia selama periode tahun 2012 hingga 2023. Secara umum, dapat diamati bahwa terjadi penurunan yang konsisten dalam tingkat kemiskinan nasional dari tahun ke tahun, dengan beberapa pengecualian yang mencerminkan dinamika sosial ekonomi tertentu. Pada 2012, persentase penduduk miskin sebesar 11,7%, turun bertahap hingga 9,2% pada 2019, mencerminkan perbaikan sosial-ekonomi akibat pertumbuhan ekonomi, program perlindungan sosial, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Namun, pada 2020, kemiskinan melonjak ke 10,2% karena pandemi COVID-19 yang mengganggu pasar tenaga kerja dan penghasilan rumah tangga. Pasca-2020, tren kembali menurun, mencapai 9,3% pada 2023, menunjukkan pemulihan ekonomi, meski belum mencapai titik terendah sebelum krisis. Keberhasilan penurunan kemiskinan pada periode MDGs (2000–2015) memberikan landasan kuat bagi kebijakan pasca-2015, meskipun tantangan baru seperti pandemi COVID-19 memengaruhi dinamika kemiskinan.

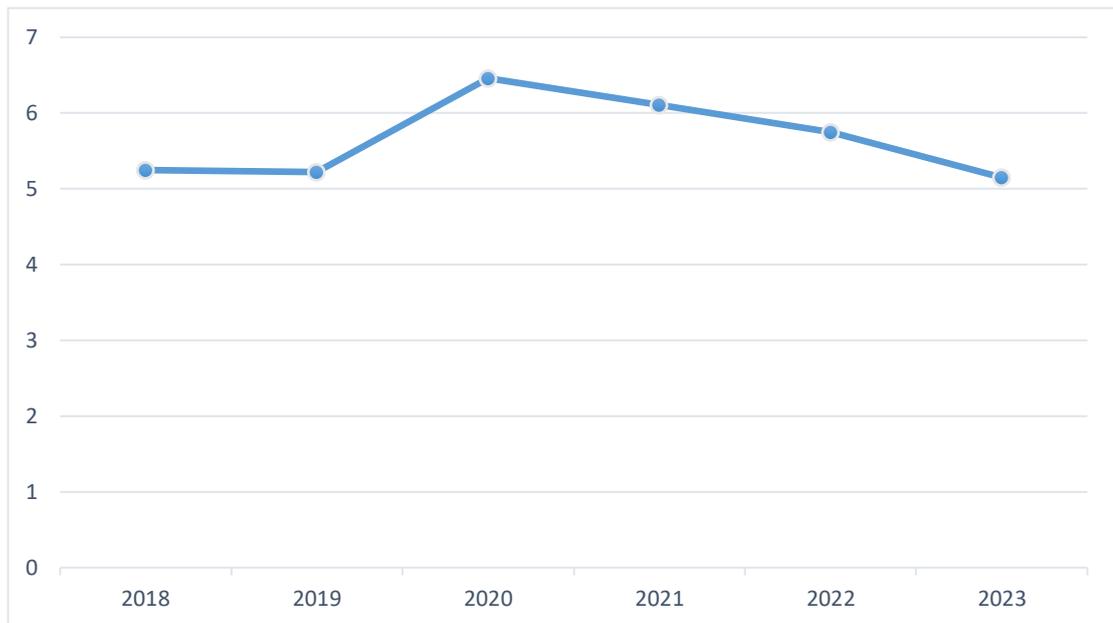


Sumber: BPS dan Worldbank

Gambar 1.2 Presentase Penduduk Miskin Indonesia 2000-2015

Gambar 1.2 menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin di Indonesia dari 19,4% (2000) menjadi 11,13% (2015), sejalan dengan target MDGs dan RPJMN. Namun, pada 2006, kemiskinan melonjak dari 16,0% ke 17,75% akibat kenaikan harga BBM yang memicu inflasi. Pasca-2006, penurunan berlanjut konsisten hingga 2015, didukung jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi. Capaian ini menegaskan pentingnya kebijakan sosial responsif selain pertumbuhan ekonomi, menjadi dasar strategi SDGs pasca-2015, meluncurkan program strategis seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan memberdayakan masyarakat, sehingga berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 19,14% pada tahun 2000 menjadi 11,13% pada tahun 2015 menurut laporan Bappenas (2015), meskipun tantangan pemerataan pembangunan antarwilayah tetap menjadi hambatan signifikan; bertransisi ke era Sustainable Development Goals (SDGs) pasca-2015, Indonesia mengadopsi kerangka SDGs melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017, menerjemahkan tujuan global ke dalam program nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan dan kesehatan, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk memperluas layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin, serta Dana Desa untuk mempercepat pembangunan pedesaan, yang secara kolektif menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 9,22% pada September 2019 (VNR 2021, Bappenas); namun, pandemi COVID-19 pada 2020 mengguncang capaian ini, menyebabkan lonjakan kemiskinan ke 10,19% dengan tambahan sekitar 2,76 juta orang miskin (BPS, 2021) akibat disrupsi ekonomi, meningkatnya pengangguran, dan penurunan pendapatan rumah tangga, yang secara tidak proporsional memengaruhi kelompok rentan seperti anak-anak, dengan tingkat kemiskinan anak melonjak dari 10,5% pada 2020 menjadi 12,5% pada 2022 (UNICEF-SMERU, 2022) dan perempuan; untuk meredam dampak pandemi, pemerintah memperluas program bantuan sosial seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang menegaskan peran krusial intervensi negara dalam melindungi masyarakat rentan dan memitigasi dampak krisis ekonomi terhadap kemiskinan.



Sumber: BPS 2023

Gambar 1.3 Presentase TPT untuk Perempuan di Indonesia tahun 2018-2023

Berdasarkan laporan BPS tahun 2023, pandemi COVID-19 telah memperburuk kondisi perempuan di Indonesia, terutama dalam hal akses terhadap pekerjaan dan pendapatan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) perempuan melonjak signifikan dari 5,23% pada Agustus 2019 menjadi 6,68% pada Agustus 2020 (BPS, 2021). Untuk merespons situasi ini, pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan perspektif gender dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan. Sebagai contoh adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang memberi akses bantuan tunai bersyarat terhadap ibu-ibu dari keluarga miskin, dengan tujuan meningkatkan akses kepada layanan kesehatan dan juga pendidikan untuk anak-anak mereka.

Kondisi kemiskinan di Indonesia, diantaranya di Provinsi Lampung, masih menyisakan pekerjaan rumah yang cukup besar meskipun ada upaya yang dilakukan di sektor ekonomi. Lampung memiliki potensi ekonomi yang sangat besar utamanya dari sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, namun kesenjangan perekonomian menjadi masalah yang cukup serius. Lampung terletak secara strategis di ujung selatan Sumatra dengan luas wilayah 34.623,80 km² dan populasi 9.007.848 pada tahun 2020. Sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatra, Lampung memiliki pentingnya strategis di bidang perdagangan dan

logistik. Selain itu, Lampung dikenal sebagai lumbung pangan nasional, yang mana dari sektor pertanian memiliki andil kepada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 28,39% pada tahun 2021 (BPS Lampung, 2021, 2022). Peneliti Akan coba gambarkan beberapa jenis komoditas unggul pertanian di Provinsi Lampung.:

- a. Singkong: Produksi singkong Lampung mencapai 5,7 juta ton di tahun 2020, menyumbang berkisar 30% dari produksi nasional (Kementerian Pertanian, 2021).
- b. Kopi: Produksi kopi Lampung mencapai 131.501 ton pada tahun 2020 (Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, 2021).
- c. Lada: Produksi lada Lampung mencapai 27.752 ton pada tahun 2020 (Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, 2021).
- d. Kelapa Sawit: di Lampung luas area perkebunan kelapa sawit mencapai 271.873 hektar pada tahun 2020 (Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, 2021).

Namun, ketergantungan besar pada sektor pertanian dapat menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi karena sektor industri dan jasa lainnya masih terbilang kurang berkembang. Iswanti (2021) menunjukkan bahwa ketidaksetaraan antar sektor dapat memperburuk kemiskinan jika pendapatan dan peluang kerja tidak didistribusikan secara merata. Pendapatan pertanian di Lampung masih di bawah rata-rata (Rahmawati, 2019).

Oleh karena itu, meskipun ada banyak sumber daya alam di daerah tersebut, Lampung masih menghadapi tantangan serius berupa kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi (BPS, 2021; Susanti, 2020). Menurut data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun 2023, 11,11% dari penduduk di Lampung tergolong miskin, sedangkan rata-rata nasional hanya 9,36%. Angka ini mempunyai dampak luas terhadap kehidupan masyarakat dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang memadai. Di antara provinsi-provinsi di Sumatra, Lampung termasuk provinsi dengan persentase penduduk yang lebih tinggi hidup dalam kemiskinan. Keadaan ini menekankan perlunya studi mendalam tentang penyebab kemiskinan serta kebutuhan akan strategi anti-

kemiskinan yang relevan dengan karakteristik geografis yang unik dari Provinsi Lampung. Ini jelas terlihat dari Tabel 1.1 di bawah ini yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Provinsi Lampung masih hidup dalam kemiskinan.

Tabel 1.1 Presentase Penduduk Miskin di Sumatera tahun 2023

PROVINSI	Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Tahun 2023
Aceh	14.45
Bengkulu	14.04
Sumatera Selatan	11.78
Lampung	11.11
Sumatera Utara	8.15
Jambi	7.58
Riau	6.68
Sumatera Barat	5.95
Kepulauan Riau	5.69
Kepulauan Bangka Belitung	4.52

Sumber: BPS 2023

Dalam perbandingan regional, Provinsi Lampung berada pada posisi keempat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatra, dengan persentase 11,11%, di bawah Aceh (14,45%), Bengkulu (14,04%), dan Sumatra Selatan (11,78%). Posisi ini menegaskan pentingnya perhatian khusus terhadap masalah kemiskinan di Provinsi Lampung. Meskipun berbagai program pemerintah dan upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Rahman et al. (2022) menekankan pentingnya strategi penargetan yang fokus pada penyebab kemiskinan di daerah yang lebih miskin seperti Provinsi Lampung (Rahman, Suhendra, & Fitria, 2022). Dalam konteks ini, peneliti berusaha untuk lebih memahami kemiskinan di Provinsi Lampung dengan memeriksa faktor-faktor di tingkat kabupaten/kota. Data berikut menunjukkan variasi yang signifikan dalam tingkat kemiskinan di kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung.

Tabel 1.2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung tahun 2023

Kabupaten/Kota	Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung tahun 2023
Lampung Utara	17.17
Pesawaran	13.85
Lampung Timur	13.8
Pesisir Barat	13.49
Lampung Selatan	12.79
Lampung Barat	11.17
Way Kanan	11.02
Lampung Tengah	10.65
Tanggamus	10.52
Pringsewu	9.14
Tulang Bawang	8.04
Bandar Lampung	7.77
Metro	7.28
Tulang Bawang Barat	7.25
Mesuji	6.73

Sumber: BPS, 2023

Meskipun upaya pengentasan kemiskinan terus berlangsung di Provinsi Lampung, tingkat kemiskinan antarwilayah masih bervariasi secara signifikan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 pada Tabel 1.2, Lampung Utara memiliki tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 17,17%, diikuti Pesawaran (13,85%) dan Lampung Timur (13,80%). Sebaliknya, wilayah seperti Mesuji, Tulang Bawang Barat, dan Kota Metro mencatat tingkat kemiskinan yang lebih rendah, masing-masing 6,73%, 7,25%, dan 7,28%. Bandar Lampung, sebagai ibu kota provinsi, memiliki tingkat kemiskinan 7,77%, yang mencerminkan kesenjangan perkembangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan perlu disesuaikan dengan karakteristik unik setiap wilayah untuk mendukung pembangunan yang adil dan inklusif.

Kemiskinan tidak hanya masalah ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak dasar dan ketidaksetaraan sosial. Ketidaksetaraan tinggi menghambat kemajuan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, sebagaimana dikemukakan Todaro dan Smith (2015) dan didukung oleh studi Oxford Academic Journal (2018). Di Lampung, keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan memperparah

kemiskinan (Nurdin & Sari, 2022). Indikator ketidaksetaraan utama, Rasio Gini, menunjukkan distribusi pendapatan; semakin tinggi nilai Rasio Gini, semakin besar ketidaksetaraan. Rasio Gini Lampung pada 2023 tercatat 0,324 dan menurun menjadi 0,301 pada September 2024, masih lebih rendah dari rata-rata nasional 0,379, namun ketimpangan tetap berpotensi memperburuk kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang meningkatkan akses layanan dasar dan pemerataan pendapatan diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan secara efektif di Lampung.

Tabel 1.3 Rasio gini Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung tahun 2023

Kabupaten/Kota	Rasio gini Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung tahun 2023
Bandar Lampung	0.381
Lampung Timur	0.315
Pesisir Barat	0.315
Pringsewu	0.306
Lampung Utara	0.3
Metro	0.289
Lampung Tengah	0.285
Mesuji	0.285
Tulang Bawang	0.284
Way Kanan	0.281
Lampung Barat	0.274
Tulang Bawang Barat	0.274
Lampung Selatan	0.257
Tanggamus	0.256
Pesawaran	0.251

Sumber: BPS, 2023

Data pada Tabel 1.3 menunjukkan variasi Rasio Gini di kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Bandar Lampung mencatat Rasio Gini tertinggi sebesar 0,381, sedangkan Lampung Selatan, Tanggamus, dan Pesawaran memiliki Rasio Gini lebih rendah, berkisar antara 0,251 hingga 0,257. Variasi ini menunjukkan perlunya kebijakan khusus untuk mengurangi ketimpangan wilayah. Selain Rasio Gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga penting untuk memahami kemiskinan di Lampung, karena IPM mengukur kualitas hidup melalui kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang terkait erat dengan kemiskinan (UNDP, 2020).

IPM yang rendah mencerminkan keterbatasan keterampilan, yang dapat memperburuk kemiskinan dan memerangkap individu dalam siklus kemiskinan. Anand dan Ravallion (2019) menemukan bahwa pada tingkat nasional, peningkatan IPM sebesar 1% berkorelasi dengan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,7%. Di Lampung, Rasyid dan Rusdarti (2021) melaporkan bahwa setiap kenaikan satu poin IPM dapat mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 0,8%.

Tabel 1.4 IPM Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung tahun 2023

Kabupaten/Kota	IPM Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung tahun 2023
Bandar Lampung	78.56
Metro	78.36
Pringsewu	71.61
Lampung Tengah	71.6
Lampung Timur	71.21
Tulang Bawang	70.02
Lampung Selatan	69.63
Lampung Barat	69.11
Lampung Utara	68.95
Way Kanan	68.63
Tanggamus	67.86
Tulang Bawang Barat	67.81
Pesawaran	66.7
Pesisir Barat	66
Mesuji	65.64

Sumber: BPS, 2023.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 pada Tabel 1.4, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Provinsi Lampung tercatat di Bandar Lampung (78,56) dan Kota Metro (78,36), sedangkan IPM terendah ada di Mesuji (65,64) dan Pesisir Barat (66,00). Rendahnya IPM di beberapa wilayah Lampung menunjukkan tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan, terutama akibat kesenjangan akses pendidikan antara kota dan desa serta keterbatasan infrastruktur kesehatan di daerah kumuh (Nurhasanah et al., 2022).

Selain IPM, tingkat pengangguran juga berperan penting dalam dinamika kemiskinan di Lampung. Ariansyah (2021) dan Mukhtar (2019) menemukan adanya keterkaitan antara tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan kemiskinan.

Namun, Sayifullah dan Gandasari (2023) menyatakan bahwa TPT tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan jika pendapatan rumah tangga berada di atas rata-rata. TPT, yang mengukur proporsi angkatan kerja yang belum terserap ke dalam dunia kerja, merupakan indikator kunci untuk menilai kemiskinan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Tabel 1.5 TPT Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung 2023

Kabupaten/Kota	TPT Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung 2023
Bandar Lampung	7.43
Lampung Utara	5.73
Pesawaran	5.06
Lampung Selatan	4.95
Pringsewu	4.66
Tulang Bawang Barat	3.89
Metro	3.6
Pesisir Barat	3.47
Tulang Bawang	3.46
Tanggamus	3.35
Lampung Tengah	3.25
Lampung Timur	3.09
Way Kanan	3.07
Mesuji	2.46
Lampung Barat	2.25

Sumber: BPS, 2023

Data pada Tabel 1.5 menunjukkan variasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung. Bandar Lampung mencatat TPT tertinggi sebesar 7,43%, yang berpotensi berkontribusi pada tingginya tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Sebaliknya, Kabupaten Lampung Utara dan Pesawaran memiliki TPT yang lebih rendah, masing-masing 5,73% dan 5,06%, mengindikasikan perekonomian yang relatif stabil. Wilayah dengan TPT di bawah 5%, seperti Lampung Selatan (4,95%) dan Pringsewu (4,66%), menunjukkan ketersediaan lapangan kerja yang lebih baik. Lampung Barat dan Mesuji, dengan TPT terendah yaitu 2,46% dan 2,25%, berhasil menunjukkan kemampuan mereka dalam mengembangkan perekonomian lokal. Oleh karena itu, analisis TPT menjadi penting untuk merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di Provinsi Lampung.

Berdasarkan data dan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Provinsi Lampung. Penelitian ini berfokus pada kesenjangan sosial yang diukur melalui Rasio Gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan tingkat kemiskinan di wilayah Lampung. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial di Provinsi Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesenjangan sosial yang diukur menggunakan rasio gini berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode 2012-2023?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode 2012–2023?
3. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode 2012–2023?
4. Apakah kesenjangan sosial yang diukur menggunakan rasio gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode 2012–2023?

1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah kesenjangan sosial yang diukur menggunakan rasio gini berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode 2012–2023.

2. Untuk mengetahui apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode 2012–2023.
3. Untuk mengetahui apakah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode 2012–2023.
4. Untuk mengetahui apakah kesenjangan sosial yang diukur menggunakan rasio gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode 2012–2023.

Manfaat penelitian

Kemudian dari pada itu, manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah

a). Manfaat Teoritis

1. Dapat memberi manfaat guna pembangunan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi.
2. Masuk Sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bagi pemerintah daerah untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial serta meningkatkan IPM di Provinsi Lampung.

b). Manfaat Praktis

1. Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pembangunan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Memberikan bahan evaluasi dan masukan untuk perumusan kebijakan.
3. Meningkatkan wacana literatur akademik Universitas Lampung yang diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan kepada mahasiswa, khususnya tentang isu perencanaan pembangunan.

II.KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

A. Tinjauan Teoritis

2.1.1 Konsep kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan di mana seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan paling dasar mereka, baik kebutuhan non-makanan maupun kebutuhan terkait makanan. Kemiskinan mengindikasikan keterbatasan yang tidak terarah dalam aspek tertentu dalam kehidupan (BPS, 2020). Menurut publikasi *Handbook of Poverty and Inequality* yang diterbitkan World Bank (2012), pengertian yang terdapat di atas diperluas dengan ditambahkan bahwa kemiskinan bukan hanya kekuarangan fisik semata tetapi mencakup *deprivation* dalam aspek kehidupan yang lebih luas termasuk kesehatan, pendidikan serta akses terhadap sumber daya dasar lainnya. Dalam konteks Indonesia, pengukuran kemiskinan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan adalah batas minimum pengeluaran atau pendapatan per kapita yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik pangan maupun non-pangan, agar seseorang atau keluarga tidak dikategorikan sebagai miskin. Pendekatan ini berfokus pada kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Garis Kemiskinan dihitung berdasarkan dua komponen utama, yaitu kebutuhan pangan dan non-pangan. Kebutuhan pangan diukur dari konsumsi kalori minimum untuk hidup sehat, yaitu 2.100 kilokalori per orang per hari. Sementara itu, kebutuhan non-pangan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya. Seseorang atau keluarga dikategorikan sebagai miskin jika pengeluaran per kapitanya berada di bawah Garis Kemiskinan yang telah ditetapkan.

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan dengan menggabungkan dua komponen utama, yaitu Garis Kemiskinan Pangan (GKP) dan Garis Kemiskinan Non-Pangan (GKNP).

Rumus dasar Garis Kemiskinan dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\mathbf{GK = GKP + GKNP}$$

Di mana:

GK: Garis Kemiskinan total (dalam Rupiah per kapita per bulan).

GKP: Garis Kemiskinan Pangan, yaitu biaya minimum untuk memenuhi kebutuhan 2.100 kilokalori per hari.

GKNP: Garis Kemiskinan Non-Pangan, yaitu biaya minimum untuk memenuhi kebutuhan non-pangan seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Untuk menghitung GKP, BPS menggunakan pendekatan *Food Energy Intake* (FEI), yaitu dengan menentukan paket konsumsi pangan yang setara dengan 2.100 kilokalori per hari berdasarkan harga pasar terkini. Harga ini dihitung berdasarkan komoditas pangan yang umum dikonsumsi oleh kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah.

Secara matematis, GKP dapat dituliskan sebagai:

$$\mathbf{GKP = \sum_{i=1}^n (P_i \times Q_i)}$$

Di mana:

P_i: Harga per unit komoditas pangan ke-i.

Q_i: Kuantitas komoditas pangan ke-i yang setara dengan kebutuhan kalori.

n: Jumlah jenis komoditas pangan yang termasuk dalam paket konsumsi.

Sementara itu, GKNP dihitung berdasarkan pengeluaran rata-rata kelompok masyarakat miskin untuk kebutuhan non-pangan. Komponen ini diestimasi dari data survei, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang mencatat pola pengeluaran rumah tangga.

GKNP dituliskan sebagai berikut:

$$\mathbf{GKNP} = \sum_{j=1}^m (\mathbf{Cj} \times \mathbf{Wj})$$

Di mana:

Cj: Biaya rata-rata untuk kebutuhan non-pangan ke-j.

Wj: Bobot atau proporsi kebutuhan non-pangan ke-j.

m: Jumlah jenis kebutuhan non-pangan.

Pada Maret 2023, BPS menetapkan Garis Kemiskinan nasional sebesar Rp 550.458 per kapita per bulan. Garis Kemiskinan ini terdiri dari Garis Kemiskinan Pangan (GKP) sebesar Rp 408.522 dan Garis Kemiskinan Non-Pangan (GKNP) sebesar Rp 141.936. Maka, Garis Kemiskinan total dapat dihitung sebagai berikut:

$$\mathbf{GK} = \mathbf{GKP} + \mathbf{GKNP} = 408.522 + 141.936 = \mathbf{Rp\ 550.458}$$

Dengan demikian, seseorang dengan pengeluaran per kapita di bawah **Rp 550.458** per

Bulan pada Maret 2023 Akan dikategorikan sebagai miskin.

Persentase penduduk miskin dihitung untuk mengetahui proporsi populasi yang hidup di bawah Garis Kemiskinan. BPS menggunakan data dari Susenas untuk mengidentifikasi jumlah individu atau rumah tangga dengan pengeluaran per capita di bawah GK, lalu membandingkannya dengan total populasi. Rumus persentase penduduk miskin adalah:

$$\mathbf{Presentase\ Penduduk\ Miskin} = \left(\frac{\mathbf{JUMLAH\ PENDUDUK\ MISKIN}}{\mathbf{TOTAL\ POPULASI}} \right) \times \mathbf{100}$$

Di mana:

Jumlah Penduduk Miskin: Jumlah individu dengan pengeluaran per capita di bawah Garis Kemiskinan, dihitung dari data survei.

Total Populasi: Jumlah total penduduk dalam wilayah atau periode yang dianalisis.

Untuk memahami persistensi kemiskinan di Provinsi Lampung meskipun ada upaya pengentasan, teori *Vicious Circle of Poverty* dari Ragnar Nurkse menjelaskan bahwa rendahnya pendapatan dan tabungan menghambat investasi dan produktivitas, sehingga menjebak wilayah dalam siklus kemiskinan. Teori ini relevan untuk menganalisis tantangan kemiskinan di Lampung. Konsep ini menegaskan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah kekurangan sumber daya ekonomi, tetapi juga isu struktural yang memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Siagian (2012) menegaskan bahwa kemiskinan disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

- 1) Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang miskin dan terutama terwujud dalam bentuk ketidakmampuan. Faktor-faktor tersebut meliputi: faktor intelektual, fisik, mental, emosional atau temperamental, spiritual, sosial psikologis, keterampilan, dan aset.
- 2) Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri orang atau keluarga yang mengalami dan menghadapi kemiskinan. Faktor-faktor tersebut meliputi: kurangnya akses terhadap layanan sosial dasar; hak kepemilikan tanah yang tidak terlindungi; terbatasnya kesempatan kerja formal; budaya yang tidak mendukung kesejahteraan dan kemajuan; kondisi geografis yang menantang, terpencil, dan tandus; serta kebijakan publik yang belum berpihak pada masyarakat miskin.

2.1.2 Konsep kesenjangan sosial

Kesenjangan sosial, yang didefinisikan sebagai ketidaksetaraan dalam aspek sosial atau budaya yang merugikan kelompok tertentu (Soekanto, 2010), menyebabkan ketidakadilan, seperti terbatasnya kesempatan dan akses bagi kelompok kurang mampu (Wilkinson & Pickett, 2018). Dalam konteks pembangunan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, yang diukur melalui Rasio Gini, menjadi indikator utama kesenjangan sosial karena mencerminkan disparitas kesejahteraan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah (Sukirno, 2010). Kuncoro (2010) menyatakan bahwa ketimpangan ini dipengaruhi oleh perbedaan akses

terhadap sumber daya, kondisi geografis, dan ketidakseimbangan faktor produksi, yang memperburuk kesenjangan antarwilayah.

Beberapa teori ekonomi menjelaskan penyebab ketimpangan sosial:

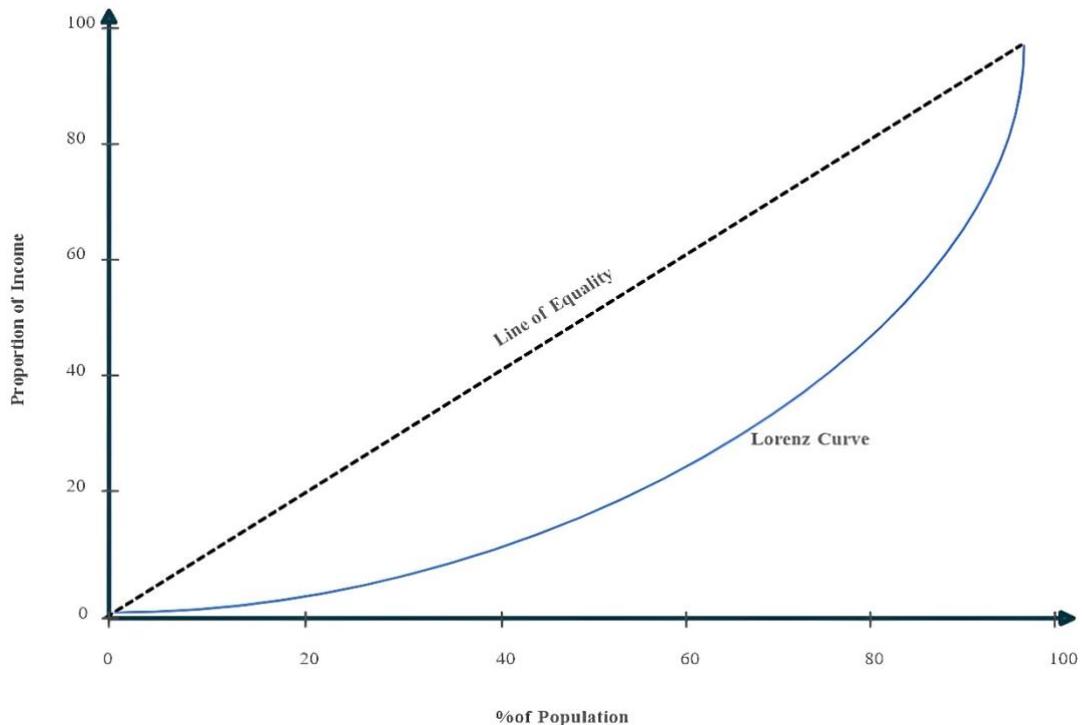
- 1) Teori Kesenjangan Sosial Karl Marx (1848): Dalam *The Communist Manifesto*, Marx menyatakan bahwa kapitalisme menciptakan ketimpangan melalui dominasi pemilik modal (*borjuis*) atas alat produksi, yang mengeksploitasi pekerja (*proletariat*), menghasilkan kekayaan bagi segelintir orang sementara mayoritas miskin. Ia mengusulkan revolusi sosial untuk distribusi kekayaan yang merata (Marx & Engels, 1848).
- 2) Teori Dualisme Ekonomi W. Arthur Lewis (1954): Kesenjangan sosial muncul dari perbedaan produktivitas antara sektor tradisional (pertanian) dan modern (industri dan jasa). Ketimpangan melebar pada tahap awal pembangunan karena sektor modern menyerap tenaga kerja terbatas dengan upah rendah, tetapi dapat berkurang melalui migrasi tenaga kerja jika sektor modern berkembang pesat (Lewis, 1954).
- 3) Teori Distribusi Pendapatan Robert J. Barro (2000): Pendidikan adalah kunci mengurangi kesenjangan sosial, karena akses pendidikan yang lebih baik meningkatkan keterampilan dan peluang ekonomi, sehingga menurunkan rasio gini (Barro, 2000).

Rasio gini, sebagai alat pengukur ketimpangan pendapatan, dihitung berdasarkan Kurva Lorenz, yang menggambarkan hubungan antara proporsi kumulatif penduduk dan proporsi kumulatif pendapatan yang mereka terima. Nilai Rasio gini berkisar antara 0 hingga 1, dengan interpretasi sebagai berikut:

1. Nilai 0: Menunjukkan kesetaraan sempurna, di mana semua individu memiliki pendapatan atau pengeluaran yang sama.

2. Nilai 1: Menunjukkan ketimpangan sempurna, di mana satu individu atau kelompok menguasai seluruh pendapatan atau pengeluaran.

Calculation of Gini Coefficient using Lorenz Curve



Gambar 2.1 Kurva lorenz

Sumber: *lister.co.id* (2025)

Kurva Lorenz pada gambar di atas menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu masyarakat. Sumbu horizontal (X) merepresentasikan persentase kumulatif penduduk, sedangkan sumbu vertikal (Y) menunjukkan persentase kumulatif pendapatan yang diterima.

Dalam kurva ini, terdapat dua garis penting:

1. Garis Kesetaraan Sempurna (*Perfect Equality Line*) merupakan garis diagonal lurus dari titik (0,0) ke titik (1,1), yang mencerminkan kondisi ideal di mana setiap persen penduduk menerima persentase pendapatan yang sama. Misalnya, 20% penduduk menerima 20% total pendapatan, dan seterusnya.

2. Kurva Lorenz adalah garis melengkung yang menunjukkan distribusi aktual pendapatan. Semakin jauh kurva ini dari garis kesetaraan sempurna, maka semakin timpang distribusi pendapatan di wilayah tersebut.

Rasio gini dihitung berdasarkan luas area antara Kurva Lorenz dan garis kesetaraan sempurna (garis diagonal yang mewakili distribusi merata). Secara matematis, Rasio gini (G) didefinisikan sebagai:

$$G = \frac{A}{A+B}$$

Di mana:

A: Luas area antara garis kesetaraan sempurna dan Kurva Lorenz.

B: Luas area di bawah Kurva Lorenz.

A + B: Total luas di bawah garis kesetaraan sempurna, yang selalu bernilai 0,5 (setengah dari persegi satuan).

Ketimpangan pendapatan yang tinggi memperparah siklus kemiskinan struktural, karena pertumbuhan ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan (Ravallion & Datt, 1996). Ketimpangan ekstrem juga menghambat investasi pada modal manusia, seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga mempersulit mobilitas sosial (Galor, 2000). Dalam jangka panjang, ketimpangan yang tidak terkendali mengurangi efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemerataan pendapatan melalui kebijakan sosial, investasi dalam pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, Rasio Gini digunakan untuk menganalisis kesenjangan sosial di Provinsi Lampung, memungkinkan evaluasi dampak ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan serta identifikasi kebijakan yang efektif untuk mengurangi disparitas tersebut (Atkinson & Bourguignon, 2000).

2.1.3 Konsep indeks pembangunan manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator utama untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia suatu negara. IPM menilai rata-rata pencapaian

dalam tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (BPS, 2018). Dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) sejak 1990, IPM bertujuan untuk mengukur kesejahteraan manusia berdasarkan ketiga dimensi tersebut (UNDP, 1990). Seiring waktu, konsep IPM terus disempurnakan agar lebih komprehensif dalam menggambarkan kesejahteraan manusia. Dalam dekade terakhir, pendekatan multidimensi semakin diperkuat melalui penelitian yang menekankan kualitas hidup yang lebih luas, melampaui sekadar pertumbuhan ekonomi (UNDP, 2020).

Menurut teori Alkire, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak hanya mengukur hasil pembangunan, tetapi juga proses yang memungkinkan individu mencapai kesejahteraan. Alkire dan Santos (2010) menekankan bahwa pendekatan multidimensi dalam pembangunan manusia mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi, seperti ketimpangan pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, dan distribusi kekayaan yang lebih adil. Penelitian mereka juga menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia semakin kompleks, terutama dalam konteks globalisasi dan perubahan iklim. Selain itu, IPM dapat digunakan untuk mengklasifikasikan status suatu negara sebagai maju, berkembang, atau terbelakang (Sulistiani & Afni, 2007).

IPM dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu:

1) Kualitas Pendidikan

Salah satu penyebab utama kenaikan Indeks Pembangunan Manusia adalah pendidikan. Penelitian terbaru oleh Hanushek dan Woessmann (2020) menunjukkan bahwa kualitas pendidikan yang lebih baik berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Mereka berpendapat bahwa investasi dalam kualitas pendidikan, termasuk kurikulum yang adaptif dan guru yang berkualitas, adalah kunci untuk meningkatkan kapabilitas manusia dan IPM secara keseluruhan (Hanushek & Woessmann, 2020).

2) Layanan Kesehatan

Komponen penting IPM adalah perawatan kesehatan berkualitas tinggi, di mana angka harapan hidup sering kali digunakan sebagai indikator utama. Studi oleh Deaton (2013) menunjukkan bahwa negara-negara dengan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan berkualitas memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan angka harapan hidup yang lebih panjang. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap kesehatan yang merata dapat mempersempit kesenjangan sosial dan meningkatkan IPM (Deaton, 2013).

3) Standar Hidup dan Ketahanan Ekonomi

Pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita digunakan untuk mengukur dimensi standar hidup IPM. Namun, penelitian terbaru oleh Milanovic (2016) menekankan bahwa standar hidup juga harus mencakup ketahanan ekonomi, yaitu kemampuan individu dan masyarakat untuk bertahan dari krisis ekonomi dan sosial. Pendekatan ini melihat ketahanan sebagai komponen penting dari pembangunan manusia, yang dapat memitigasi dampak krisis terhadap kesejahteraan masyarakat (Milanovic, 2016). Nilai IPM berada di antara 0 dan 1. Semakin tinggi tingkat pembangunan manusia, semakin dekat dengan angka 1.

BPS menghitung IPM menggunakan metodologi UNDP, yang menggabungkan tiga indeks dimensi, Indeks Harapan Hidup (IHH), Indeks Pendidikan (IP), dan Indeks Standar Hidup Layak (ISHL) dalam rata-rata geometris. Rumus IPM adalah:

$$\text{IPM} = \sqrt[3]{\text{IHH} \times \text{IP} \times \text{ISHL}}$$

1. Indeks Harapan Hidup

$$\text{IHH} = \frac{\text{AHH} - \text{AHH}_{\min}}{\text{AHH}_{\max} - \text{AHH}_{\min}}$$

Di mana:

AHH: Angka harapan hidup saat lahir

AHH_{\min} : Nilai minimum AHH yang ditetapkan (batas bawah biologis) 25 th

AHH_{max} : Nilai maksimum AHH yang ditetapkan (batas atas optimal usia harapan hidup) 85 th

2. Indeks Pendidikan

$$IP = \frac{RLS+HLS}{2}$$

Di mana:

RLS: Rata-rata Lama Sekolah

HLS: Harapan Lama Sekolah

3. Indeks Standar Hidup Layak

$$IHSL = \frac{\log(\text{PENGELUARAN PERKAPITA}) - \log(300.000)}{\log(1.200.000) - \log(300.000)}$$

Di mana:

ISHL = Indeks Standar Hidup Layak

Pengeluaran per Kapita = Rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (d disesuaikan berdasarkan harga konstan 2012)

300.000 = batas bawah pengeluaran per kapita per tahun (nilai minimum, dalam ribuan rupiah)

1.200.000 = batas atas pengeluaran per kapita per tahun (nilai maksimum, dalam ribuan rupiah)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun berdasarkan tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (BPS, 2023). Dimensi kesehatan diukur melalui Indeks Harapan Hidup (IHH), yang mencerminkan kualitas layanan kesehatan dan kondisi medis suatu wilayah. Nilai IHH yang tinggi menunjukkan usia harapan hidup yang lebih panjang dan akses yang lebih baik terhadap fasilitas kesehatan. Dimensi pendidikan diwakili oleh Indeks Pendidikan (IP), yang dihitung dari rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). IP yang tinggi mengindikasikan tingkat literasi, keterampilan, dan kapabilitas intelektual masyarakat yang lebih baik, yang mendukung pengembangan sumber daya manusia. Dimensi standar hidup layak diukur melalui Indeks Standar Hidup Layak (ISHL), yang berdasarkan pengeluaran riil per kapita dan mencerminkan kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian,

dan perumahan. Ketiga indeks ini digabungkan secara geometrik untuk menghasilkan nilai IPM, yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah.

Nilai IPM yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah memiliki kualitas hidup yang baik, dengan masyarakat yang lebih sehat, terdidik, dan memiliki daya beli yang memadai. Sebaliknya, IPM yang rendah mengindikasikan adanya masalah struktural, seperti tingginya angka kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, atau keterbatasan akses kesehatan, yang perlu menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan.

2.1.4 Konsep Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didefinisikan sebagai persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) dalam angkatan kerja yang tidak bekerja, tetapi aktif mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Angkatan kerja mencakup penduduk yang bekerja (penuh waktu, paruh waktu, atau sementara) dan mereka yang tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan. Penduduk di luar angkatan kerja, seperti pelajar, ibu rumah tangga, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan, tidak dihitung dalam TPT. TPT diukur melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), yang dilakukan BPS setiap Februari dan Agustus untuk menggambarkan dinamika pasar tenaga kerja. Penghitungan TPT menggunakan rumus berikut:

$$\text{TPT} = \left(\frac{\text{JUMLAH PENGANGGUR TERBUKA}}{\text{JUMLAH ANGKATAN KERJA}} \right) \times 100$$

Di mana:

Jumlah Penganggur Terbuka: Penduduk dalam angkatan kerja yang tidak bekerja, tetapi aktif mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha.

Jumlah Angkatan Kerja: Total penduduk usia kerja yang bekerja atau tidak bekerja tetapi aktif mencari kerja.

2.1.4.1 Jenis Pengangguran

Menurut Kuncoro (2013), pengangguran terbuka mencakup individu yang sedang mencari pekerjaan, merintis usaha, atau tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, tetapi tidak bekerja. Kategori ini menggambarkan mereka yang secara aktif atau pasif berada dalam kondisi menganggur.

Berdasarkan faktor penyebabnya, terdapat beberapa kategori pengangguran berikut:

1. Pengangguran Friksional / *Frictional Unemployment*

Pengangguran karena friksional, Pengangguran sementara yang disebabkan oleh hambatan informasi, waktu, dan geografis antara pencari kerja dan lowongan kerja dikenal sebagai pengangguran friksional.

2. Pengangguran Struktural / *Structural Unemployment*

Pengangguran yang bersifat structural, Pengangguran struktural terjadi ketika pencari kerja yang menganggur tidak dapat memenuhi persyaratan lowongan kerja. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang lebih berkualitas meningkat seiring dengan tingkat pembangunan ekonomi suatu wilayah.

3. Pengangguran Musiman / *Seasonal Unemployment*

Pengangguran musiman adalah kondisi pengangguran yang disebabkan oleh perubahan sementara dalam perekonomian. Misalnya, pedagang durian dan petani menunggu musim durian dan musim tanam.

4. Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklus terjadi ketika permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada pasokan tenaga kerja sebagai akibat dari naik turunnya siklus ekonomi.

2.1.4.2 Teori Tentang Pengangguran

Pemikiran tentang pengangguran telah berkembang dari teori klasik hingga pendekatan modern. Dalam perspektif ekonomi klasik, David Ricardo (1817)

menjelaskan bahwa upah akan selalu bergerak menuju tingkat subsisten, dan pasar tenaga kerja bersifat fleksibel. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja akan disesuaikan oleh mekanisme pasar tanpa intervensi pemerintah.

Sebaliknya, John Maynard Keynes (1936) melalui *The General Theory of Employment, Interest, and Money* menyatakan bahwa pengangguran dapat berlangsung dalam jangka panjang akibat kurangnya permintaan agregat. Dalam kondisi krisis, penurunan konsumsi menyebabkan pemutusan hubungan kerja, dan pasar tidak mampu memulihkan keseimbangan dengan sendirinya. Oleh karena itu, Keynes menekankan pentingnya intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk menstimulasi permintaan dan menciptakan lapangan kerja.

Dalam konteks yang lebih kontemporer, Suharto (2005) membagi paradigma pengangguran ke dalam dua pendekatan: neo-liberal dan sosial-demokrat. Paradigma neo-liberal memandang pengangguran sebagai masalah individual yang dapat diselesaikan melalui pertumbuhan ekonomi dan kemandirian. Sementara itu, paradigma sosial-demokrat menganggap pengangguran sebagai akibat dari ketimpangan struktural dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, sehingga diperlukan kebijakan publik yang inklusif untuk menanganinya.

Selanjutnya, Todaro dan Smith (2015) mengemukakan konsep pengangguran tersembunyi, yakni kondisi ketika individu tetap bekerja di sektor tradisional seperti pertanian, namun tidak berkontribusi secara produktif terhadap output. Meski secara statistik tercatat sebagai bekerja, pendapatan dan produktivitas mereka sangat rendah, dan sering kali mereka terjebak dalam pekerjaan subsisten karena tidak memiliki akses ke sektor formal yang lebih produktif.

Melengkapi pemahaman ini, Bastagli et al. (2016) memperkenalkan teori jaring pengaman sosial, yang menekankan bahwa dampak pengangguran terhadap kemiskinan dapat ditekan melalui kebijakan perlindungan sosial seperti bantuan tunai, subsidi pangan, dan program padat karya. Dengan keberadaan jaring

pengaman sosial yang kuat, masyarakat tetap dapat mempertahankan daya beli dan standar hidup dasar meskipun berada dalam kondisi menganggur. Hal ini menjelaskan mengapa di beberapa wilayah seperti Provinsi Lampung, tingkat pengangguran terbuka tidak selalu berkorelasi langsung dengan peningkatan kemiskinan.

Dengan demikian, teori-teori tersebut memberikan sudut pandang yang beragam mengenai penyebab, bentuk, serta dampak pengangguran terhadap kesejahteraan masyarakat, serta menekankan pentingnya intervensi struktural dalam menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi.

b. Tinjauan Empiris (Penelitian Terdahulu)

Penulis mencoba meninjau sejumlah penelitian sebelumnya yang membahas subjek ini sebelum memulai penelitian ini. Beberapa Studi-studi ini tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	David Brady dan Markus Jäntti, 2016	Rich Countries' Economic Performance, and Poverty, and Inequality	Analisis regresi data panel lintas negara	Studi ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi secara signifikan oleh kinerja ekonomi seperti ditunjukkan oleh metrik seperti HDI dan tingkat pengangguran. Namun, efek ini dimediasi oleh kebijakan redistribusi dan institusi pasar tenaga kerja.
2	Sayifullah, Tia Ratu Gandasari, 2016	Pengaruh IPM, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten	Regresi data panel Variabel Bebas: IPM dan Pengangguran	Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor pengangguran dan indeks pembangunan manusia memiliki dampak gabungan terhadap kemiskinan. Meskipun variabel pengangguran tidak secara signifikan

- memengaruhi kemiskinan, variabel indeks pembangunan manusia memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kemiskinan sampai batas tertentu. Selain itu, nilai koefisien determinasi adalah 0,96.
- 3 Dani Zanzibar, Fika Rahmadhania, Ratri Kiswanda, Misfi Laili Rohmi, 2024 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Timur Analisis regresi linear berganda Variabel Bebas: IPM, dan Pengangguran Variabel Terikat: Kemiskinan Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM memiliki dampak negatif yang besar terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Dengan demikian, semakin besar pendapatan rumah tangga yang dapat dibelanjakan (IPM), semakin rendah tingkat kemiskinan. Lebih jauh, pengangguran secara signifikan mengurangi kemiskinan. Ini berarti bahwa tingkat kemiskinan meningkat sebanding dengan tingkat pengangguran.
- 4 Ari Kristin Prasetyoningrum, U. Sulia Sukmawati, 2018 Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia Menggunakan Metode *path analysis* (analisis jalur) Variabel Bebas: IPM, PDRB, dan TPT Variabel Terikat: Kemiskinan Menurut penelitian ini, kemiskinan secara signifikan dipengaruhi secara negatif oleh peningkatan HDI, tetapi tidak ada efek langsung yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi (probabilitas 0,23). Namun, kemiskinan secara signifikan dipengaruhi secara positif oleh tingkat pengangguran (koefisien 0,14; probabilitas 0,0035), sekaligus memediasi pengaruh IPM dan pertumbuhan ekonomi, menekankan peran krusial pengangguran dalam dinamika kemiskinan.

- | | | | | |
|---|--|--|---|--|
| 5 | Novia Rahmawati, Panji Kusuma Prasetyanto, Fitrah Sari, 2022 | Pengaruh IPM, Upah Minimum Regional (UMR), dan TPT Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2017-2021 (Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia) | Regresi data panel

Variabel Bebas: IPM, UMR dan Pengangguran

Variabel Terikat: Kemiskinan | Temuan penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Regional (UMR), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Analisis data dari 34 provinsi selama 2017-2021 menunjukkan IPM berpengaruh negatif signifikan, UMR berpengaruh positif signifikan, dan jumlah orang miskin secara signifikan terkena dampak negatif oleh TPT. |
| 6 | Noor Zuhdiyati Dan David K, 2017. | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus pada 33 Provinsi) | Regresi data panel

Variabel Bebas: IPM, Pertumbuhan ekonomi dan Pengangguran

Variabel Terikat: Kemiskinan | Nilai f statistik < 0,05 menunjukkan bahwa variabel bebas pertumbuhan ekonomi, TPT, dan IPM secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat kemiskinan. Sebesar 96% variabel terikat mampu dijelaskan oleh variabel bebas, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain, sesuai dengan nilai 0,96840. |
| 7 | Shidiq Ramdan Dinata, Mahendra Romus, Yanti, 2020. | Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau Tahun 2003-2018 | Regresi Linier Berganda

Variabel Bebas: IPM, Pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan Pengangguran

Variabel Terikat: Kemiskinan | Berdasarkan temuan penelitian, kemiskinan dipengaruhi secara negatif oleh IPM. Kemiskinan di Provinsi Riau tidak dipengaruhi secara signifikan oleh pertumbuhan ekonomi. |

- | | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 8 | Muhammad Sri Wahyudi Sulis wanto, 2010. | Pengaruh PDB, dan IPM terhadap angka kemiskinan di Indonesia | Regresi data panel

Variabel Bebas: IPM, dan PDB

Variabel Terikat: Kemiskinan | Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kemiskinan dipengaruhi secara signifikan dan negatif oleh PDRB dan IPM. (2) Faktor-faktor tersebut mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. |
| 9 | Novianto, S, 2018. | Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Inflasi, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. | Regresi data panel

Variabel Bebas: IPM, inflasi, Pengangguran dan Pertumbuhan ekonomi

Variabel Terikat: Kemiskinan | Menurut penelitian ini, kemiskinan dipengaruhi secara negatif oleh inflasi, HDI, dan pertumbuhan ekonomi, sementara pengangguran berpengaruh positif. Artinya, pertumbuhan ekonomi dan IPM yang tinggi serta inflasi rendah dapat mengurangi kemiskinan, sementara tingkat pengangguran yang tinggi dapat meningkatkannya di kabupaten/kota Jawa Tengah. |
| 10 | M. Alhudori, 2017. | Pengaruh IPM, PDRB, dan jumlah pengangguran terhadap penduduk miskin di Provinsi Jambi | Analisis regresi linear berganda

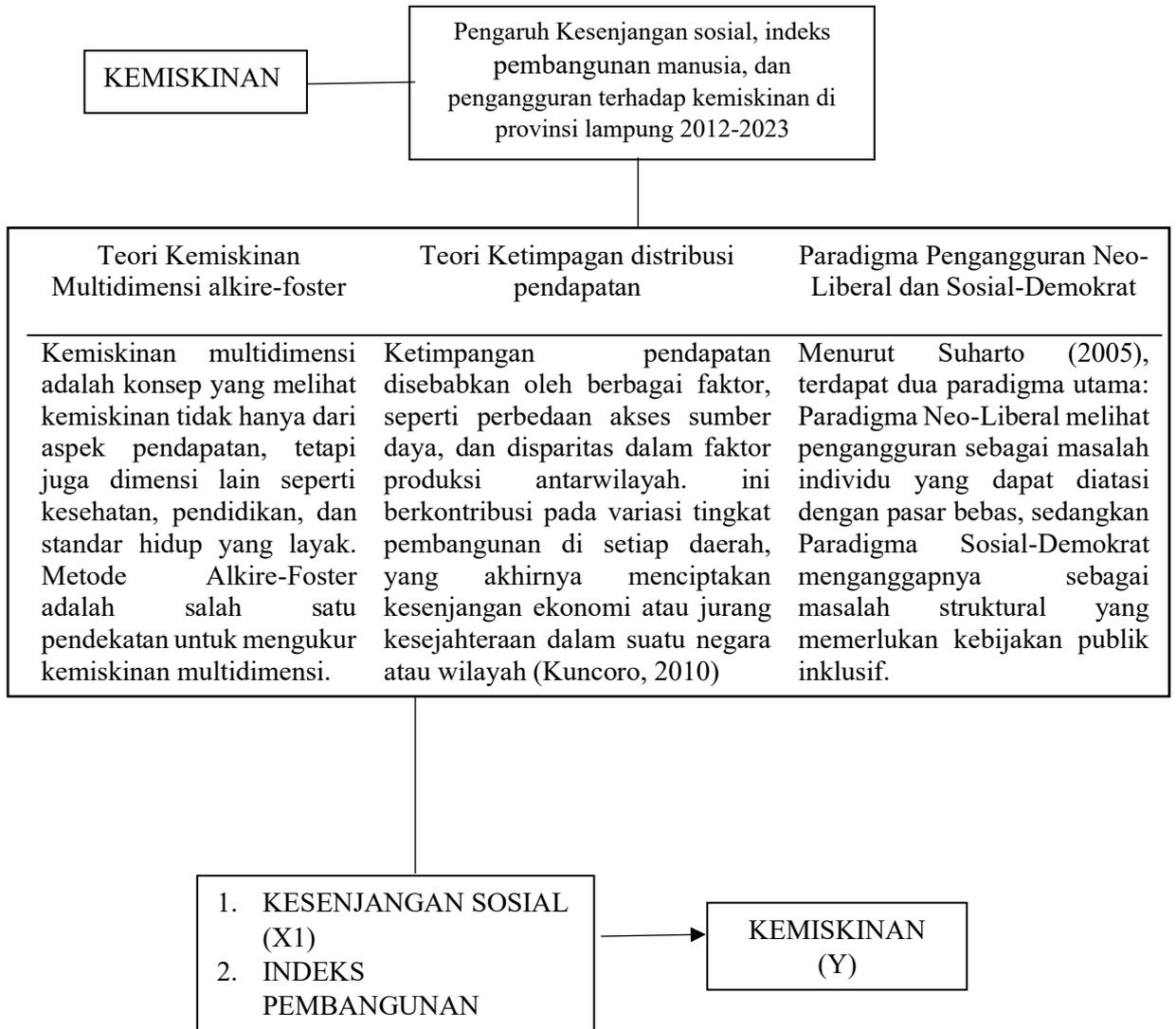
Variabel Bebas: IPM, Pengangguran dan PDRB

Variabel Terikat: Kemiskinan | Analisis regresi linear berganda di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa IPM memiliki korelasi positif dengan jumlah penduduk miskin (setiap kenaikan 1% IPM meningkatkan kemiskinan sebesar 0,358). PDRB berkorelasi negatif (setiap kenaikan 1% PDRB menurunkan kemiskinan sebesar -0,006), sementara jumlah pengangguran berkorelasi positif (setiap kenaikan 1% pengangguran meningkatkan kemiskinan sebesar 0,010). |
| 11 | Martin Ravallion, 2016 | The Economics of Poverty: History, Measurement, and Policy | Analisis historis dan ekonometrik | Ravallion menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi penting untuk pengentasan kemiskinan, tetapi dampaknya |

				bervariasi tergantung pada tingkat ketimpangan dan kebijakan redistribusi. Ia juga menganalisis hubungan antara pengangguran, kesenjangan sosial, dan kemiskinan, menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi secara signifikan oleh pengangguran.
12	Eleftherios Giovanis dan Öznur Özdamar, 2019	An Empirical Analysis of the Relationship between Income Inequality, Poverty, and Human Development: Panel Data Evidence from BRICS Countries	Regresi data panel dengan Generalized Method of Moments (GMM) Y: Tingkat kemiskinan X: Indeks Gini, IPM, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi	Studi ini menunjukkan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan dan pengangguran meningkatkan kemiskinan, sementara peningkatan IPM mengurangi kemiskinan di negara-negara BRICS.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penjelasan logis tentang hubungan antara variabel disebut kerangka berpikir. Kerangka pemikiran dapat membantu peneliti untuk mengembangkan hipotesis dan menentukan metode penelitian yang sesuai.



Penelitian ini menganalisis kesenjangan sosial yang diukur menggunakan Rasio Gini (X1), Indeks Pembangunan Manusia (X2), dan pengangguran yang diukur menggunakan TPT (X3) sebagai variabel independen untuk mengevaluasi pengaruhnya terhadap kemiskinan (Y) di Provinsi Lampung. Penelitian ini memberikan gambaran dinamis tentang keterkaitan faktor-faktor tersebut dengan kemiskinan di wilayah ini, dianalisis melalui beberapa teori kunci:

- 1) Teori Kemiskinan Multidimensi Alkire-Foster (2011) yang memperluas konsep kemiskinan dari sekadar pendapatan, melibatkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, memberikan pemahaman menyeluruh tentang kemiskinan.
- 2) Pernyataan Kuncoro (2010) tentang ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh perbedaan akses sumber daya dan disparitas faktor produksi antarwilayah merupakan pengembangan dari teori polarisasi ekonomi yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal dan Albert O. Hirschman, yang menjelaskan fenomena perbedaan pembangunan antara wilayah pusat (*core*) dan pinggiran (*periphery*), serta menekankan bahwa ketimpangan melekat pada standar hidup relatif masyarakat sehingga menimbulkan variasi tingkat kesejahteraan dan pembangunan antarwilayah, di mana ketimpangan bukan sekadar perbedaan nominal pendapatan, tetapi juga mencerminkan disparitas kualitas hidup secara keseluruhan.
- 3) Paradigma Pengangguran Neo-Liberal dan Sosial-Demokrat, yang menjelaskan peran pengangguran terbuka dalam konteks kemiskinan melalui dua pendekatan: Neo-Liberal dan Sosial-Demokrat (Suharto, 2005)¹

¹ Suharto, E. (2005). Memahami kemiskinan di Indonesia. Bandung: Alfabeta.

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan jangka pendek mengenai korelasi antara variabel. Penelitian yang akan diuji kebenarannya melalui analisis data. Hipotesis dapat dibuat berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, atau intuisi peneliti.

Berdasarkan kerangka berpikir, Dengan demikian, berikut adalah hipotesis penelitian tersebut:

1. Hipotesis 1 (H1): Kesenjangan sosial yang diukur menggunakan rasio gini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode 2012–2023.
2. Hipotesis 2 (H2): Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode 2012–2023.
3. Hipotesis 3 (H3): Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode 2012–2023.

2.4 Relevansi Variabel Bebas terhadap Kemiskinan

Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Provinsi Lampung, penelitian ini menggunakan variabel independen, yaitu kesenjangan sosial yang diukur menggunakan rasio gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pengangguran yang diukur menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang memiliki hubungan erat dengan kemiskinan berdasarkan kerangka teoretis dan empiris.

2.4.1. Rasio gini dan Kemiskinan

Tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah diukur menggunakan rasio gini. Karena sebagian besar orang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka akibat distribusi pendapatan yang tidak merata, ketimpangan yang tinggi dapat memperburuk kemiskinan. Todaro dan Smith (2020) menjelaskan bahwa Tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat pembangunan inklusif dalam perekonomian, meningkatkan jumlah penduduk miskin, dan memperburuk kesenjangan sosial. Hal ini sesuai dengan penelitian Bank Dunia tahun 2021 yang menunjukkan bahwa bahkan dalam kasus pertumbuhan ekonomi, tingkat

kemiskinan lebih sulit diturunkan di negara-negara dengan ketimpangan pendapatan tinggi.

2.4.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan

Berdasarkan tiga faktor utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak, IPM merupakan ukuran kualitas hidup suatu komunitas. Kemungkinan penduduk dapat keluar dari kemiskinan dan meningkatkan standar hidup mereka meningkat seiring dengan IPM suatu wilayah. Menurut teori pembangunan berbasis kapabilitas yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1999), Peningkatan mutu sumber daya manusia sangat penting untuk menurunkan angka kemiskinan dalam jangka panjang. Studi Alkire dan Foster (2011) Selain itu menunjukkan bagaimana pengeluaran kesehatan dan pendidikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu serta mendorong mobilitas sosial ke atas.

2.4.3. Pengangguran dan Kemiskinan

Secara teori, pengangguran yang tinggi berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan karena keterbatasan sumber pendapatan rumah tangga. Tingginya jumlah individu yang tidak memiliki pekerjaan formal dapat berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat dan meningkatnya risiko sosial ekonomi. Menurut Keynes (1936), dalam teori pengangguran Keynesian, Kontraksi dalam permintaan agregat yang disebabkan oleh tingkat pengangguran yang tinggi pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperdalam kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Fields (2011) lebih lanjut menunjukkan hubungan erat antara meningkatnya pengangguran dan meningkatnya tingkat kemiskinan, terutama di negara berkembang yang memiliki keterbatasan dalam jaring pengaman sosial.

Namun, dalam berbagai situasi ekonomi, terutama di negara berkembang, korelasi antara pengangguran terbuka dan kemiskinan tidak selalu signifikan. Keberadaan sektor informal yang cukup dominan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap hal ini. Menurut teori pengangguran tersembunyi yang dikemukakan oleh Todaro (2000), di negara berkembang, banyak individu yang tetap memiliki aktivitas ekonomi meskipun tidak tercatat sebagai pekerja formal. Mereka mungkin bekerja di sektor informal, seperti usaha mikro, perdagangan

kecil, atau pertanian subsisten, yang memungkinkan mereka tetap memperoleh pendapatan meskipun tidak masuk dalam kategori pekerja resmi. Studi yang dilakukan oleh Chen (2012) juga menemukan bahwa Meskipun tidak memiliki status pekerjaan resmi, orang-orang di sektor informal tetap menghasilkan cukup uang untuk menutupi biaya pokok mereka.

Menurut Bastagli et al. (2012), teori jaring pengaman sosial menunjukkan bahwa program bantuan sosial pemerintah, seperti subsidi pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan jaminan sosial, dapat mengurangi dampak kemiskinan pada masyarakat kurang mampu, meskipun tingkat pengangguran yang diukur menggunakan TPT (X3) tinggi. Dengan memahami hubungan antara kesenjangan sosial yang diukur menggunakan Rasio Gini (X1), Indeks Pembangunan Manusia (X2), dan pengangguran yang diukur menggunakan TPT (X3) terhadap kemiskinan (Y), kebijakan pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung dapat difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung dan BPS Pusat periode 2012–2023. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan oleh pihak lain melalui dokumentasi, studi pustaka, atau sumber daring, yang dapat digunakan kembali untuk penelitian (Sugiyono, 2018). Data yang dipakai berupa data panel, yaitu gabungan data lintas waktu (2012–2023) dan lintas wilayah (15 kabupaten/kota di Lampung), sehingga memungkinkan analisis perubahan variabel sepanjang waktu sekaligus perbandingan antarwilayah. Dalam penelitian ini, data yang dianalisis meliputi kesenjangan sosial yang diukur menggunakan Rasio Gini (X1), Indeks Pembangunan Manusia (X2), dan pengangguran yang diukur menggunakan TPT (X3), yang dievaluasi terhadap kemiskinan (Y) di setiap kabupaten/kota. Data bersumber dari lembaga pemerintah yang kredibel, memastikan validitas dan keandalan hasil penelitian.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Sumber Data
Tingkat Kemiskinan (Y)	Persentase penduduk miskin terhadap total penduduk	% Penduduk di bawah garis kemiskinan	(Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2023)
Kesenjangan Sosial (X1)	(Rasio gini) Indeks ketimpangan distribusi pendapatan	Rentang 0-1 (semakin besar, semakin timpang)	(Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2023)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X2)	Indikator kualitas hidup berdasarkan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan	Skor IPM (0-100)	(Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2023)
Pengangguran (X3)	(TPT) Persentase pengangguran dari total angkatan kerja	% TPT	(Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2023)

Sumber: data olahan peneliti, 2024

a) Kesenjangan Sosial X1

Kesenjangan sosial dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio gini, yaitu indikator statistik yang menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Skala rasio gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Data rasio gini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung untuk periode 2012–2023.

b) Indeks Pembangunan Manusia X2

Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Nilai IPM berkisar antara 0 hingga 1, di mana angka yang lebih tinggi mencerminkan tingkat pembangunan manusia yang lebih baik. Data IPM untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama tahun 2012–2023 diperoleh dari BPS.

c) Pengangguran X3

Pengangguran dalam penelitian ini diukur melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu persentase angkatan kerja yang belum bekerja namun sedang aktif mencari pekerjaan. Data TPT diperoleh dari BPS Provinsi Lampung untuk periode 2012–2023 dan dinyatakan dalam persentase terhadap total angkatan kerja.

d) Kemiskinan Y

Kemiskinan diukur berdasarkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu batas minimum pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan nonpangan. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai jumlah rupiah minimum yang diperlukan seseorang untuk hidup layak. Data kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari BPS Provinsi Lampung untuk periode 2012–2023 dan dinyatakan dalam persentase terhadap jumlah penduduk.

3.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, sebuah teknik statistik yang menggabungkan dimensi lintas individu dan waktu dalam satu model estimasi.

Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap variasi antarunit analisis, seperti kabupaten/kota di Provinsi Lampung, sekaligus mengamati perubahan sepanjang waktu. Menurut Gujarati dan Porter (2009), data panel memungkinkan pengamatan unit analisis yang sama pada periode berbeda, sehingga hubungan antarvariabel dapat dianalisis secara mendalam.

Proses estimasi dilakukan menggunakan perangkat lunak E-Views 12, yang dirancang untuk pengolahan data ekonomi dan statistik panel secara efisien. Aplikasi ini mendukung uji model, seleksi pendekatan estimasi terbaik, serta interpretasi hasil yang akurat, sehingga mendukung validitas dan keandalan hasil analisis dalam penelitian ini.

3.3.1 Uji Statistik Deskriptif

Tahap awal dalam analisis dilakukan melalui uji statistik deskriptif untuk memperoleh gambaran umum mengenai karakteristik variabel yang digunakan, yaitu kesenjangan sosial yang diukur menggunakan rasio gini (X1), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X2), pengangguran yang diukur menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (X3), dan kemiskinan (Y). Analisis ini mencakup data panel dari Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung selama periode 2012–2023. Hasilnya memberikan informasi awal mengenai distribusi, nilai tengah, dan penyebaran masing-masing variabel, yang menjadi dasar bagi analisis regresi pada tahap selanjutnya.

3.3.2 Metode Estimasi Model Regresi Data Panel

Fixed effect model/Model Efek Tetap (FEM), Random effect model/Model Efek Acak (REM), dan Common effect model/Model Efek Umum (CEM) adalah tiga model utama yang digunakan dalam analisis data panel untuk memperkirakan hubungan antara variabel independen dan dependen. Jenis data dan asumsi yang mendasarinya memiliki dampak signifikan pada model mana yang terbaik Porter dan Gujarati (2009).

1) Fixed Effect Model (FEM)

Fixed Effect Model (FEM) digunakan ketika karakteristik spesifik individu tetap konstan sepanjang waktu dan berkorelasi dengan variabel independen. Gujarati (2009) menjelaskan bahwa model ini memungkinkan adanya perbedaan intercept antar individu tetapi tetap mengasumsikan bahwa slope regresi tidak berubah. Baltagi (2005) menambahkan bahwa dalam FEM, efek tetap dapat ditangkap melalui variabel dummy atau melalui pendekatan Within Estimator, yang dapat menghilangkan bias akibat faktor yang tidak teramati. Persamaan FEM dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \delta_3 D_3 + \dots + \delta_{15} D_{15} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

Y_{it} = persentase penduduk miskin di kabupaten/kota i pada tahun t

β_0 = Konstanta

$X1_{it}$ = Rasio gini di kabupaten/kota i pada tahun t

$X2_{it}$ = IPM di kabupaten/kota i pada tahun t

$X3_{it}$ = TPT di kabupaten/kota i pada tahun t

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi variabel independen

D_1, D_2, D_3, \dots = dummy variabel untuk efek tetap masing-masing kabupaten/kota

δ = Koefisien dummy

ε_{it} = Error term

Gujarati dan Porter (2009) menjelaskan bahwa model FEM cocok digunakan ketika terdapat heterogenitas yang tidak teramati di antara individu-individu dalam sampel, dan efek tersebut dianggap tetap selama periode penelitian. Estimasi parameter dalam model FEM biasanya dilakukan menggunakan metode *Least Squares Dummy Variable* (LSDV) atau Within Estimator untuk mengeliminasi pengaruh efek tetap.

2) Random Effect Model (REM)

Random Effect Model (REM) membuat asumsi bahwa perbedaan individu bersifat acak dan tidak terkait dengan variabel independen daripada tetap. Gujarati (2009) mengemukakan bahwa model ini lebih efisien dibandingkan FEM jika asumsi ketidakberkorelasiannya terpenuhi. Baltagi (2005) menambahkan bahwa REM dapat mengatasi masalah berkurangnya derajat kebebasan yang sering terjadi pada FEM akibat banyaknya variabel dummy yang digunakan. Persamaan REM dapat dinyatakan sebagai:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + u_i + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

Y_{it} = persentase penduduk miskin di kabupaten/kota i pada tahun t

β_0 = Konstanta

$X1_{it}$ = Rasio gini di kabupaten/kota i pada tahun t

$X2_{it}$ = IPM di kabupaten/kota i pada tahun t

$X3_{it}$ = TPT di kabupaten/kota i pada tahun t

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi variabel independen

u_i = Efek individu yang bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen

ε_{it} = Error term

Estimasi dalam REM sering dilakukan menggunakan metode *generalized Least Squares* (GLS), yang bertujuan untuk mengatasi heteroskedastisitas dan autokorelasi dalam error term.

3) Common Effect Model (CEM)

Common Effect Model (CEM) atau Pooled Least Squares (PLS) mengasumsikan bahwa data panel dapat dianalisis tanpa mempertimbangkan perbedaan individu maupun waktu. Dalam model ini, semua unit observasi memiliki intercept dan slope

yang sama, sehingga tidak ada efek spesifik dari individu atau waktu yang diperhitungkan. Gujarati (2009) menyatakan bahwa model ini cocok digunakan ketika heterogenitas antar individu dan antar waktu tidak signifikan. Sementara itu, Baltagi (2005) menegaskan bahwa CEM dapat menjadi pendekatan awal sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut untuk memilih model yang lebih kompleks.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

Y_{it} = persentase penduduk miskin di kabupaten/kota i pada tahun t

β_0 = Konstanta

$X1_{it}$ = Rasio gini di kabupaten/kota i pada tahun t

$X2_{it}$ = IPM di kabupaten/kota i pada tahun t

$X3_{it}$ = TPT di kabupaten/kota i pada tahun t

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi variabel independen

ε_{it} = Error term individu i pada waktu t

Estimasi parameter dalam model CEM dilakukan menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS). Menurut Gujarati dan Porter (2009), CEM digunakan ketika tidak ada perbedaan signifikan antara individu dalam sampel yang dianalisis, atau ketika efek individu dan efek waktu dianggap tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.4 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Sejumlah uji statistik digunakan dalam proses pemilihan model regresi data panel penelitian ini untuk mengidentifikasi model yang paling baik menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Bastagli dkk. (2012) menyatakan bahwa memilih model regresi yang tepat sangat penting untuk mencegah bias dalam estimasi parameter dan menjamin bahwa hubungan yang ditemukan secara akurat mewakili pola dalam data. Baltagi (2005) dan Gujarati dan Porter (2009) juga menggarisbawahi bahwa untuk menghasilkan estimasi yang lebih andal dan efektif, fitur data dan asumsi yang mendasarinya harus

diperhitungkan saat memilih model regresi panel. Rangkaian uji statistik berikut digunakan dalam penelitian ini untuk memilih model regresi data panel:

Menurut Basuki & Yuliadi (2015), terdapat tiga metode yang dapat digunakan untuk memperkirakan model regresi data panel, yaitu:

a) Uji Chow

Bertujuan untuk menentukan fixed effect model atau common effect model yang cocok dalam memperkirakan data panel. Berikut adalah hipotesis dalam Uji Chow:

H_0 = Common Effect Model

H_1 = Fixed Effect Model

H_0 ditolak ketika fixed effect model adalah opsi yang paling tepat, apabila P-Value ($\leq \alpha = 5\%$). Common effect model lebih cocok digunakan, tetapi ketika probabilitas ($\geq \alpha = 5\%$) dan mengartikan bahwa H_0 diterima.

b) Uji Hausman

Bertujuan untuk melihat model manakah yang terbaik dari penelitian data panel, antara random effect model atau fixed effect model. Berikut ini adalah hipotesis yang terbentuk:

H_0 = Random Effect Model

H_1 = Fixed Effect Model

H_0 ditolak ketika fixed effect model adalah opsi yang paling tepat, apabila P-Value ($\leq \alpha = 5\%$). Random effect model lebih tepat untuk digunakan, ketika nilai probabilitas ($\geq \alpha = 5\%$) dan mengartikan bahwa H_0 diterima.

c) Uji Lagrange Multiplier

Merupakan uji statistik yang melihat apakah data panel harus diperkirakan menggunakan random effect model atau common effect model. Uji Lagrange Multiplier (LM) mengarah pada perumusan hipotesis berikut:

H_0 = Common Effect Model

H_1 = Random Effect Model

Random effect model adalah model terbaik untuk digunakan apabila nilai probabilitas Breusch-Pagan ($< \alpha = 5\%$), sehingga mengartikan bahwa H_0

ditolak. Common effect model adalah model terbaik untuk digunakan apabila nilai probabilitasnya ($> \alpha = 5\%$), sehingga mengartikan bahwa H_0 diterima.

3.5 Uji Asumsi Klasik

Untuk memastikan model regresi memenuhi persyaratan estimasi parameter yang objektif dan efektif, uji asumsi klasik harus dilakukan sebelum analisis regresi data panel. Normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi termasuk asumsi dasar dalam regresi yang ingin dicegah agar tidak dilanggar oleh uji asumsi tradisional (Gujarati & Porter, 2009). Menurut Baltagi (2005), dalam regresi data panel, pengujian asumsi klasik juga membantu dalam memilih model terbaik serta meningkatkan validitas hasil analisis.

3.5.1 Uji Normalitas

Untuk memastikan apakah kesalahan acak dalam model regresi terdistribusi normal atau tidak, uji normalitas digunakan. Gujarati (2009) menyatakan bahwa asumsi normalitas diperlukan agar pengujian statistik yang dilakukan valid, terutama dalam sampel kecil. Uji normalitas dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain:

- a) Uji Jarque-Bera (JB Test): Menguji distribusi residual berdasarkan skewness dan kurtosis.
- b) Uji Kolmogorov-Smirnov (KS Test): Menguji distribusi data dengan membandingkannya dengan distribusi normal standar.

Hipotesis dalam uji normalitas adalah:

- a) H_0 : Residual berdistribusi normal
- b) H_1 : Residual tidak berdistribusi normal

Jika nilai probabilitas dari uji normalitas lebih besar dari tingkat signifikansi (0,05), maka H_0 tidak ditolak, yang berarti residual dianggap berdistribusi normal (Wooldridge, 2010).

3.5.2 Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui apakah variabel independen mempunyai hubungan linier yang kuat, digunakan uji multikolinearitas. Multikolinearitas dapat menyebabkan estimasi parameter regresi menjadi tidak stabil dan kurang akurat (Greene, 2012).

Di antara teknik yang digunakan dalam uji ini adalah:

- a) *Variance Inflation Factor* (VIF): Jika nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas yang serius (Gujarati & Porter, 2009).
- b) *Tolerance Test*: Jika nilai tolerance lebih dari 0,1, maka tidak terdapat multikolinearitas yang tinggi.
- c) Analisis Korelasi: Korelasi tinggi antara dua variabel independen dapat menjadi indikasi awal adanya multikolinearitas (Baltagi, 2005).

Jika ditemukan multikolinearitas yang tinggi, maka dapat dilakukan langkah-langkah seperti menghilangkan variabel independen yang redundan atau menggunakan metode estimasi alternatif seperti *Principal Component Regression* (PCR) (Wooldridge, 2010).

3.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksetaraan dalam varians galat acak dalam model regresi. Menurut Gujarati (2009), heteroskedastisitas dapat menyebabkan pengujian hipotesis yang tidak akurat dan estimasi yang tidak efisien. Uji heteroskedastisitas sering kali menggunakan teknik-teknik berikut:

- a) Uji White: Menguji ada tidaknya hubungan antara varians error dengan variabel independen.
- b) Uji Breusch-Pagan (BP Test): Mendeteksi heteroskedastisitas dengan menguji hubungan antara residual dan variabel independen.

Hipotesis dalam uji heteroskedastisitas adalah:

- a) H_0 : Tidak terdapat heteroskedastisitas
- b) H_1 : Terdapat heteroskedastisitas

Tidak terjadi heteroskedastisitas pada model apabila nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi (0,05), maka H_0 tidak ditolak. Namun, apabila Random Effect

Model (REM) merupakan model terbaik yang dipilih, Winarno (2015) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas tidak perlu dilakukan karena asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi secara otomatis pada REM.

3.5.4 Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk memastikan apakah kesalahan acak dalam satu periode waktu terkait dengan kesalahan pada periode waktu sebelumnya. Autokorelasi umumnya terjadi dalam data time series, tetapi dalam regresi data panel juga perlu diuji karena dapat menyebabkan estimasi menjadi tidak efisien (Baltagi, 2005). Metode yang digunakan dalam uji autokorelasi adalah:

- a) Uji Durbin-Watson (DW Test): Menentukan ada tidaknya autokorelasi dalam model regresi.
- b) Uji Breusch-Godfrey (BG Test): Menguji keberadaan autokorelasi dalam residual hingga lag tertentu.

Hipotesis uji autokorelasi adalah:

- a) H_0 : Tidak terdapat autokorelasi
- b) H_1 : Terdapat autokorelasi

Jika nilai probabilitas melebihi tingkat signifikansi (0,05), yang menunjukkan bahwa masalah autokorelasi tidak ada dalam model regresi (Gujarati & Porter, 2009).

3.6 Uji Signifikansi

Uji signifikansi adalah teknik statistik yang membandingkan nilai statistik uji dengan nilai kritis pada taraf signifikansi tertentu untuk menguji hipotesis penelitian. Melalui prosedur ini, peneliti dapat menilai apakah terdapat hubungan atau pengaruh yang signifikan antar variabel penelitian. Menurut Ghozali (2016), tujuan utama uji signifikansi adalah mengevaluasi hipotesis mengenai pengaruh parsial setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan demikian, uji ini tidak hanya sebatas membandingkan angka, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang arah dan kekuatan hubungan antar variabel.

3.6.1 Uji F

Menurut Ghozali (2016), tujuan uji F adalah memastikan apakah variabel independen secara simultan memengaruhi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) ditolak jika nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, yang menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan dampak signifikan terhadap variabel dependen. Pernyataan ini sejalan dengan Montgomery, Peck, dan Vining (2012), yang menjelaskan bahwa uji F membantu menentukan apakah variabel independen bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel dependen.

- a) H_0 : Rasio gini, IPM, dan pengangguran secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kemiskinan
- b) H_1 : Rasio gini, IPM, dan pengangguran secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membandingkan:

- a) Jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
- b) Jika $F \text{ hitung} \leq F \text{ tabel}$, maka H_0 tidak ditolak. Artinya, tidak ada pengaruh signifikan secara bersama-sama dari ketiga variabel terhadap kemiskinan.

3.6.2 Uji T

Studi ini menggunakan uji-t untuk menguji pengaruh parsial setiap variabel independen yaitu kesenjangan sosial yang diukur menggunakan rasio gini, indeks pembangunan manusia (IPM), dan pengangguran yang diukur menggunakan TPT terhadap kemiskinan. Prosedur uji-t dimulai dengan menghitung nilai t untuk masing-masing variabel independen, kemudian membandingkannya dengan nilai t tabel pada taraf signifikansi tertentu (misalnya 0,05 atau 5%). Nilai t tabel diperoleh dari distribusi t dengan derajat kebebasan yang sesuai. Jika nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut memiliki pengaruh parsial yang signifikan terhadap kemiskinan. Sebaliknya, jika nilai t hitung lebih kecil daripada nilai t tabel, variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan. Menurut Ghozali (2016), uji-t

berfungsi untuk mengidentifikasi variabel independen mana saja yang secara individu memberikan andil berarti dalam model regresi.

Hipotesis yang diuji untuk setiap variabel:

- a) H_0 : Variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
- b) H_1 : Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan dua cara:

- a) Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak, artinya variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
- b) Jika $t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$, maka H_0 tidak ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel tersebut terhadap kemiskinan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Beberapa kesimpulan penting mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2012–2023 dapat ditarik dari analisis data dan pembahasan pada Bab 4. Kesimpulan ini mencakup dampak dari kesenjangan sosial, indeks pembangunan manusia (IPM), serta pengangguran (TPT) terhadap kemiskinan.

1) Pengaruh Kesenjangan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan sosial yang diukur menggunakan Rasio gini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat, maka tingkat kemiskinan juga cenderung meningkat. Temuan ini memperkuat pandangan dalam teori distribusi pendapatan, yang menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi dapat memperburuk kesejahteraan masyarakat secara agregat, terutama di wilayah dengan struktur ekonomi yang tidak merata.

2) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, peningkatan IPM yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, secara nyata berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan. Hasil ini konsisten dengan pendekatan kapabilitas yang dikemukakan oleh Amartya Sen, yang menekankan pentingnya pembangunan manusia sebagai dasar untuk mencapai kesejahteraan dan mengurangi kerentanan terhadap kemiskinan.

3) Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung selama periode pengamatan. Salah satu penjelasan yang mendasari temuan ini adalah dominannya sektor informal dalam struktur ketenagakerjaan daerah, di mana sebagian besar tenaga kerja tidak tercatat dalam statistik resmi pengangguran. Selain itu, implementasi

program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) turut memberikan bantalan ekonomi bagi rumah tangga rentan, sehingga TPT tidak selalu berkorelasi langsung dengan peningkatan kemiskinan.

5.2 Saran

Beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kebijakan dan memajukan penelitian masa depan berdasarkan temuan studi ini.

1) Pengurangan Kesenjangan Sosial

Pemerintah daerah di Provinsi Lampung disarankan untuk memperkuat kebijakan redistribusi pendapatan guna menekan tingkat kesenjangan sosial. Langkah ini dapat dilakukan melalui program pemberdayaan ekonomi yang menasar kelompok rentan, seperti perempuan kepala keluarga, petani kecil, dan buruh informal. Di samping itu, peningkatan akses terhadap layanan keuangan formal dan penyediaan fasilitas pembiayaan mikro bagi masyarakat berpendapatan rendah juga perlu diperluas untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih setara.

2) Peningkatan IPM

Investasi jangka panjang dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar perlu menjadi prioritas strategis guna mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah daerah perlu memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, terutama di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar. Program yang fokus pada penguatan kualitas guru, ketersediaan fasilitas kesehatan primer, serta perbaikan gizi masyarakat dapat berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan IPM.

3) Perhatian pada Sektor Informal

Mengingat signifikansi sektor informal dalam perekonomian Lampung, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mendukung pekerja di sektor ini. Pemberian pelatihan keterampilan, akses terhadap modal usaha, serta integrasi sektor informal ke dalam perekonomian formal dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka. Pemerintah harus menyelenggarakan program pelatihan teknis dan keterampilan yang

berkelanjutan bagi pekerja sektor informal, terutama di bidang pertanian, perdagangan kecil, dan industri rumah tangga. Program pelatihan ini dapat mencakup:

- a) Peningkatan keterampilan teknis sesuai dengan bidang pekerjaan.
 - b) Keterampilan manajemen usaha untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
 - c) Literasi digital dan finansial, yang penting untuk menghadapi tantangan ekonomi modern.
- 4) Penguatan Program Bantuan Sosial

Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) terbukti efektif dalam memitigasi dampak pengangguran terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperluas cakupan dan efektivitas program-program ini dengan meningkatkan akurasi data penerima manfaat, mempercepat penyaluran bantuan, serta menyertakan komponen pemberdayaan ekonomi di dalamnya. Dengan demikian, jaring pengaman sosial dapat berfungsi lebih optimal dalam melindungi kelompok rentan dari guncangan ekonomi, termasuk risiko kehilangan pekerjaan.

5.3 Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti memperluas variabel yang diteliti, seperti pendidikan, akses layanan kesehatan, atau faktor infrastruktur publik yang mungkin memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Analisis yang lebih mendalam mengenai peran sektor informal dan dampak kebijakan pemerintah juga akan sangat membantu dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika kemiskinan di Lampung.

Daftar Pustaka

- Alkire, S., & Santos, M. E. (2010). Acute multidimensional poverty: A new index for developing countries. Human Development Research Paper 2010/11. United Nations Development Programme.
- Anand, S., & Ravallion, M. (2019). Human Development in Poor Countries: On the Role of Private Incomes and Public Services. *Journal of Economic Perspectives*, 33(4), 125-145. <https://doi.org/10.1257/jep.33.4.125>
- Ariansyah. (2021). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Kawasan Gerbangkertasusila. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*.
- Atkinson, A. B., & Bourguignon, F. (2000). *Income distribution and economics*. Oxford University Press.
- Aulia Nurlaili Kusuma Wardani, Dhel Juni Pasya, & Juliono. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen*, 14(1). DOI: 10.52657/jiem.v14i01.2045
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung. (2022). Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Lampung Tahun 2021. Bandar Lampung: BPKAD Provinsi Lampung.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. (2022). Lampung Dalam Angka 2022. Bandar Lampung: BPS Provinsi Lampung.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. (2023). Profil Kemiskinan Provinsi Lampung September 2022. Bandar Lampung: BPS Provinsi Lampung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2020). Gini Ratio Kabupaten/Kota. <https://lampung.bps.go.id/indicator/23/632/1/gini-ratio-kabupaten-kota.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2020). Indeks Pembangunan Manusia. <https://lampung.bps.go.id/indicator/26/35/1/indeks-pembangunan-manusia.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2020). Persentase Penduduk Miskin. <https://lampung.bps.go.id/indicator/23/36/1/persentase-penduduk-miskin.html>

- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2020). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). <https://lampung.bps.go.id/indicator/6/47/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE3MSMy/persentase-tenaga-kerja-informal-sektor-pertanian.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Provinsi. Diakses. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE2OCMy/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-provinsi.html>
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Baltagi, B. H. (2008). *Econometric analysis of panel data* (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Bappenas. (2015). Laporan pencapaian tujuan pembangunan milenium di Indonesia 2015. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- Bappenas. (2021). *Voluntary National Review (VNR) Indonesia 2021: Sustainable Development Goals (SDGs)*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- Barro, R. J. (2000). Inequality and growth in a panel of countries. *Journal of Economic Growth*, 5(1), 5-32.
- Bastagli, F., Hagen-Zanker, J., Harman, L., Barca, V., Sturge, G., & Schmidt, T. (2016). *Cash transfers: What does the evidence say?*. Overseas Development Institute.
- BPS. (2018). *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2020). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2020*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/2020/07/15/5e8c874c9d51f9e68d8b456f/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2020.html>
- Brooks, C. (2008). *Introductory econometrics for finance* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Deaton, A. (2013). *The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality*. Princeton University Press.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. (2021). *Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 2020*. Bandar Lampung: DKP Provinsi Lampung.

- Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. (2022). Rencana Strategis Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung 2020-2024 (Revisi). Bandar Lampung: Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
- Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. (2021). Statistik Perkebunan Lampung 2020. Bandar Lampung: Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- Dinas Pertanian Provinsi Lampung. (2021). Laporan Tahunan Sektor Pertanian Provinsi Lampung 2020. Bandar Lampung: Dinas Pertanian Provinsi Lampung.
- Farris, F. A. (2010). The Gini Index and Measures of Inequality. *The American Mathematical Monthly*, 117(10), 851-864.
- Fields, G. S. (2019). *Labor market analysis of developing countries*. Cornell University Press.
- Foster, J., Greer, J., & Thorbecke, E. (1984). A class of decomposable poverty measures. *Econometrica*, 52(3), 761-766. <https://doi.org/10.2307/1913475>
- Galbraith, J. (1979). *The Nature of Mass Poverty*. Cambridge, MA and London, England: Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/harvard.9780674333109>
- Galor, O. (2000). Income distribution and the process of development. *European Economic Review*, 44(4-6), 706-712.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2012). *Basic Econometrics* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2020). *The Knowledge Capital of Nations: Education and the Economics of Growth*. MIT Press.
- Hsiao, C. (2003). *Analysis of Panel Data* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Hsiao, C. (2014). *Analysis of panel data* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- ILO. (2022). *Global Employment Trends*. International Labour Organization.
- Iswanti, N. (2021). Analisis ketimpangan ekonomi antar sektor di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 45-56.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Statistik Pendidikan Indonesia 2021/2022*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. London: Macmillan.

- Kuncoro, M. (2010). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, M. (2012). *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, M. (2013). *Indikator Ekonomi..* Unit Penerbit Dan Percetakan PN.
- Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. *The Manchester School*, 22(2), 139-191.
- M. Alhudori. (2017). Pengaruh IPM, PDRB, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi. *Jurnal of Economics and Business*, Vol.1 No.1, hal 113-124.
- Marx, K., & Engels, F. (1848). *Manifesto Komunis [Manifest der Kommunistischen Partei]*. London: JE Burghard.
- Milanovic, B. (2016). *Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization*. Harvard University Press.
- MNovianto, S. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Inflasi, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ekonomi, Yogyakarta.
- Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2012). *Introduction to Linear Regression Analysis*. John Wiley & Sons.
- Mukhtar, Saptono, & Arifin. (2019). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Development Economic and Social Studies*.
- Noor Zuhdiyati dan David K. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus pada 33 Provinsi). *Jurnal Jibeka*, 11(2).
- Nurdin, M., & Sari, R. (2022). Analisis Faktor Penyebab Kemiskinan di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 10(1), 45-60.
- Nurhasanah, S., Hakim, L., & Sari, D. W. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung: Studi Longitudinal 2010-2020. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Regional*, 13(2), 230-252.
- Nurkse, R. (1953). *Problems of capital formation in underdeveloped countries*. Oxford University Press.
- Olivia, S., Gibson, J., & Nasrudin, R. (2020). Indonesia in the Time of Covid-19. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 143-174. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1798581>

- Oxford Academic Journal. (2018). Dampak Ketidaksetaraan Sosial terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengembangan Manusia, dan Tata Kelola. Oxford: Oxford University.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Harvard University Press.
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *EQUILIBRIUM*, 6(2), 217-240.
- Rahman, A., Suhendra, A., & Fitria, R. (2022). Strategi Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 15(2), 123-135.
- Rahmawati, D. (2019). Ketimpangan pendapatan sektor pertanian di Provinsi Lampung. *Jurnal Agribisnis*, 7(3), 102-115.
- Rahmawati, N., Prasetyanto, P. K., & Islami, F. S. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Regional (UMR), Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2017-2021 (Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia). *Convergence: The Journal of Economic Development*, 4(1), 19–31. doi: 10.33369/convergencejep.v4i1.23358
- Ramdan Dinata, Shidiq, Dkk. 2020. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2003-2018. Vol 16.No 2(2020) *Jurnal AlIqthisad*
- Rasyid, M., & Rusdarti. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 21(2), 178-195.
- Ravallion, M., & Datt, G. (1996). How important to India's poverty is the sectoral composition of growth? *The World Bank Economic Review*, 10(1), 1-25.
- Ricardo, D. (1817). *On the Principles of Political Economy and Taxation*. London: John Murray.
- Safitri, I., Moehadi, Susilo, J. H., & Endang. (2023). *Analysis Factors Influencing Economic Growth, Unemployment and Poverty in Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Safuridar & Natasya Ika Putri, 2019. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengangguran Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Aceh Bagian Timur
- Santoso, T. W. B., & Susilo, H. (2002). *Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sari, R. P., & Wulandari, A. (2017). Analisis Indeks Kedalaman Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 18(2), 189-200.

- Sayifullah, & Gandasari. (2023). Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan: Studi Kasus di Sumatera Utara. *Jurnal Promosi*.
- Sayifullah, Tia Ratu Gandasari. (2016). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(2), 115-273. DOI: <https://dx.doi.org/10.35448/jequ.v6i2.4345>
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Septianingsih, A. (2022). Pemodelan data panel menggunakan random effect model untuk analisis regresi. *Jurnal Lebesgue: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika dan Statistika*, 3(3), 525-536. DOI: <https://dx.doi.org/10.46306/lb.v3i3.163>.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sri Wahyudisuliswanto, Muhammad (2010). Pengaruh Produk Domestik bruto (PDB) Dan Indeks Pembangunan manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia. Vol 8 No 2(2010) *Jurnal Ekonomi Pembangunan*
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Memahami kemiskinan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2010). *Mikroekonomi: Teori Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Sulistiani, N., & Afni, N. (2007). *Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat*. Padang: Universitas Andalas.
- Sumarto, S., & Moselle, S. (2022). Addressing poverty and vulnerability in Indonesia: An evaluation of the national social protection strategy. *Journal of Southeast Asian Economies*, 39(2), 176-195. <https://doi.org/10.1355/ae39-2e>
- Suryadarma, D., et al. (2012). *Dampak Positif dan Signifikan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suryahadi, A., & Al Izzati, R. (2021). The impact of COVID-19 pandemic on poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(3), 1-17. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1971011>
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). Estimating the impact of COVID-19 on poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 175-192. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390>
- Suryahadi, A., et al. (2020). *The Impact of Social Protection Programs on Poverty Reduction in Indonesia*. SMERU Research Institute.
- Susanti, L. (2020). *Kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia: Pendekatan multidimensi*. Jakarta: Penerbit Gramedia.

- Syuhada, M. I. (2019). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), PDRB dan upah minimum terhadap kemiskinan studi kasus kabupaten/kota di pulau Jawa. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Economic Development* (9th ed.). Pearson Education.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic development* (11th ed.). Addison-Wesley.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Pearson Education Limited.
- UNICEF & SMERU Research Institute. (2022). *Child poverty and COVID-19 in Indonesia: Assessing the impact and looking forward*. UNICEF Indonesia dan SMERU Research Institute.
- United Nations Development Programme. (2020). *Human Development Report 2020: The Next Frontier - Human Development and the Anthropocene*. New York: UNDP.
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika pengantar dan aplikasinya*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya, disertai panduan EViews*. UPP STIM YKPN.
- Wilkinson, R. G., & Pickett, K. (2018). *The inner level: How more equal societies reduce stress, restore sanity and improve everyone's well-being*. Penguin UK, 352 pages.. Penguin.
- Winarno, W. W. (2015). *Analisis ekonometrika dan statistika dengan Eviews (Edisi keempat)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data* (2nd ed.). MIT Press.
- World Bank. (2020). *Handbook of Poverty and Inequality*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2020). *Indonesia Social Protection Program*. World Bank Group.
- World Bank. (2021). *Indonesia Economic Prospects: Boosting the Recovery*. World Bank, Washington, DC. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35762>
- World Bank. (2021). *Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2021). *World Development Report 2021: Data for Better Lives*. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1600-0>

- Zanzibar, D., Rahmadhania, F., Kiswanda, R., & Rohmi, M. L. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *JURNAL ECONOMINA*, 3(4), 562–574. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i4.1296>
- Zuhdiyati, N., & David K. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus pada 33 Provinsi). *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 25(2), 141-159.